



Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Mojokerto

LAPORAN AKHIR  
*Penyusunan Metadata*  
dan Standar Data  
*Kabupaten Mojokerto*  
Tahun Anggaran 2022

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>1.2 Dasar Hukum</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>1.3 Maksud dan Tujuan</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>1.4 Sasaran</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>1.5 Ruang Lingkup</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>1.6 Keluaran Yang Diharapkan</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>2.1 Metadata</b> .....  | <b>8</b>  |
| 2.2.1 Pengertian Metadata .....  | <b>8</b>  |
| 2.2.2 Jenis Metadata Statistik .....   | <b>9</b>  |
| <b>2.2 Standar Data</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>2.3 Standardisasi Data Statistik</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika<br/>        Kabupaten Mojokerto</b> ..... | <b>14</b> |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH</b> .....   | <b>20</b> |
| <b>3.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi</b> .....   | <b>21</b> |
| <b>3.2 Kondisi Geografis dan Topografi</b> .....   | <b>22</b> |
| <b>3.3 Aspek Demografi</b> .....   | <b>26</b> |
| <b>3.4 Pendidikan</b> .....  | <b>28</b> |
| <b>3.5 Kesehatan</b> .....   | <b>30</b> |
| <b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>32</b> |
| <b>4.1 Sumber Data</b> .....   | <b>33</b> |
| <b>4.2 Langkah-Langkah Kegiatan</b> .....  | <b>33</b> |
| <b>BAB V PEMBAHASAN</b> .....  | <b>35</b> |
| <b>5.1 Dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026</b> .....                                       | <b>36</b> |
| <b>5.2 Dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto</b> .....  | <b>81</b> |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>BAB VI PENUTUP.....</b>  | <b>106</b> |
| <b>6.1 Kesimpulan .....</b> | <b>107</b> |
| <b>6.2 Rekomendasi.....</b> | <b>107</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>109</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| <b>Tabel 1.1</b> Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .....  | 5  |
| <b>Tabel 3.1</b> Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Kabupaten Mojokerto .....   | 21 |
| <b>Tabel 3.2</b> Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan ..... | 27 |
| <b>Tabel 3.3</b> Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mojokerto .....                           | 27 |
| <b>Tabel 3.4</b> Sarana Pendidikan di Kabupaten Mojokerto.....  | 29 |
| <b>Tabel 3.5</b> Sarana Kesehatan di Kabupaten Mojokerto .....  | 31 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| <b>Gambar 2.1</b> Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ..... | 19 |
| <b>Gambar 3.1</b> Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan .....                   | 22 |
| <b>Gambar 3.2</b> Peta Kabupaten Mojokerto.....  | 23 |
| <b>Gambar 3.3</b> Tinggi Wilayah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan .....                 | 24 |
| <b>Gambar 3.4</b> Luas Lahan Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Letak Ketinggian .....              | 25 |
| <b>Gambar 3.7</b> Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Usia .....                     | 28 |



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Seluruh kumpulan data yang tersedia dalam Portal Satu Data Indonesia dapat diakses secara terbuka dan dikategorikan sebagai data publik, sehingga tidak mengandung informasi yang memuat rahasia negara, rahasia pribadi, atau hal lain sejenisnya.

Metadata sendiri merupakan sebuah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data; menjelaskan data; serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Dalam metadata terdapat Mikro data yang memuat definisi (konsep yang jelas, ukuran, satuan), cakupan pelaksanaan (cakupan wilayah, periode waktu), sumber daya yang digunakan (biaya, tenaga kerja), klasifikasi yang digunakan, metodologi, penjaminan kualitas.

Sedangkan standar data merupakan standar yang mendasari catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu, kejadian, atau kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat,

tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi tertentu.

Metadata dan standar data yang merupakan bagian dari prinsip satu data Indonesia berperan penting sebagai dokumentasi yang disediakan oleh setiap produsen data sebagai penanggung jawab data yang nantinya akan digunakan oleh pengguna data. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melaksanakan Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data pada kegiatan kali ini fokusnya terhadap data dalam RPJMD dan SDGs Kabupaten Mojokerto untuk memberikan informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

## **1.2 Dasar Hukum**

Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Terhadap Dokumen RPJMD dan SDGs Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto didasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik No 5 tahun 2020 tentang Juknis Metadata Statistik;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik No 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Palapa.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari dilaksanakannya Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Kabupaten Mojokerto adalah memberikan informasi berupa metadata dan standar data dari data pada portal satu data palapa yang meliputi definisi, rumus, klasifikasi, ukuran, dan satuan serta sebagai media dokumentasi tercetak untuk menyediakan informasi bagi pengembangan

penyelenggaraan kegiatan statistik di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

Tujuan Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Terhadap Dokumen RPJMD dan SDGs Kabupaten Mojokerto, adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya metadata variabel dari data RPJMD dan SDGs pada portal satu data palapa Kabupaten Mojokerto;
2. Tersusunnya metadata indikator dari data RPJMD dan SDGs pada portal satu data palapa Kabupaten Mojokerto;
3. Tersusunnya standar data dari data RPJMD dan SDGs pada portal satu data palapa Kabupaten Mojokerto.

#### **1.4 Sasaran**

Sasaran dari Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Kabupaten Mojokerto yaitu tersusunnya dokumen Metadata Variabel, Metadata Indikator, dan Standar Data dari data RPJMD dan SDGs Kabupaten Mojokerto pada portal Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Terhadap Dokumen RPJMD dan SDGs Kabupaten Mojokerto meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Studi literasi untuk penyusunan metadata dan standar data;
2. Membuat konsep penyusunan metadata dan standar data;

3. Mengumpulkan informasi pendukung kegiatan penyusunan metadata dan standar data RPJMD dan SDGs Kabupaten Mojokerto dari portal Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto;
4. Melakukan penyusunan laporan metadata dan standar data Kabupaten Mojokerto;
5. Melakukan validasi metadata dan standar data ke organisasi perangkat daerah terkait;
6. Melakukan pembenahan sesuai dengan validasi data;
7. Melakukan *upload* dokumen metadata dan standar data ke portal Satu data Palapa Kabupaten Mojokerto.

#### **1.6 Keluaran yang Diharapkan**

Berdasarkan tujuan di atas maka keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Kabupaten Mojokerto adalah adanya dokumen metadata dan standar data Kabupaten Mojokerto berupa dokumen cetak (*hard copy*) dan file (*soft copy*) yang di-*upload* pada portal satu data palapa.



# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Metadata

##### 2.2.1 Pengertian Metadata

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Menurut Caplan (2003) memberikan pengertian metadata yaitu *“metadata is here used to mean structured information about an information resource of any media type or format”*, yang artinya metadata digunakan untuk menjelaskan informasi yang terstruktur tentang sumber informasi dalam berbagai media atau format (Caplan, 2003). Sedangkan menurut NISO (2004) menyatakan bahwa menyatakan bahwa *“metadata is structured information that describes, explains, locates, or otherwise makes it easier to retrieve, use, or manage an information resource”* (National Information Standards Organization, 2004). Dari uraian di atas dapat diartikan metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan data, menjelaskan data untuk mempermudah dalam mengambil, menggunakan, atau mengelola informasi data.

## 2.2.2 Jenis Metadata Statistik

Dalam pengelolaannya, BPS membagi metadata menjadi tiga yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator.

### 1. Metadata Kegiatan Statistik

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan dengan benar dan tepat jika karakteristik atau atribut dari data tersebut didefinisikan dalam bentuk metadata statistik. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

## 2. Metadata Variabel Statistik

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.

## 3. Metadata Indikator Statistik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memperikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

## **2.2 Standar Data**

Menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik, Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Sedangkan, Standar Data Statistik adalah Standar Data yang mendasari data statistik. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan untuk menguji efektivitas kegiatan statistik agar kegiatan yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagipakaikan. Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan dari data yang perlu distandardisasi adalah data yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan satu data yang bermanfaat bagi semua pihak.

## **2.3 Standardisasi Data Statistik**

Standardisasi data adalah proses untuk membawa data ke dalam format umum yang memungkinkan untuk perbandingan data, analisis lintas sektor yang bersifat kolaboratif, dan berbagi pakai data itu sendiri. Dalam proses standardisasi, penetapan standar harus memenuhi asas yaitu:

1. Relevansi, ketidakberpihakan, dan keterbukaan;
2. Standar profesional, prinsip ilmiah, dan etika profesional;
3. Akuntabilitas dan transparansi;
4. Sumber statistik resmi;
5. Koheren dengan penggunaan standar internasional; dan
6. Berdimensi pembangunan.

Standardisasi data menggunakan standar data sebagai acuan, yang terdiri atas 5 komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

#### 1. Konsep

Suatu konsep mempunyai berbagai dimensi atau aspek yang merupakan karakteristik umum, di mana masing-masing dimensi dapat digambarkan ke dalam satu atau lebih indikator yang terukur; satu atau lebih indikator dapat merefleksikan variabel, satu atau lebih variabel menggambarkan dimensi, serta satu atau lebih dimensi menggambarkan sebuah konsep. Dalam kegiatan statistik, konsep adalah hal yang paling mendasar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di mana konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

#### 2. Definisi

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul

sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.

### 3. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional dan /atau melalui forum resmi lainnya.

### 4. Ukuran

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

### 5. Satuan

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lain-lain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.

## **2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto memiliki tugas pokok membantu Bupati Kabupaten Mojokerto dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik
4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dibantu oleh Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang meliputi: Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Informatika, dan Bidang Pengelolaan Data dan Statistik.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
5. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
6. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi pelayanan informasi, media komunikasi dan informasi

serta aspirasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang komunikasi dan informasi publik;
2. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
3. Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
5. Pengelolaan media komunikasi publik;
6. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;
7. Pelaksanaan layanan hubungan media;
8. Pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik;
9. Pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
10. Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
11. Pelaksanaan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
13. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi serta persandian dan keamanan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informatika mempunyai fungsi :

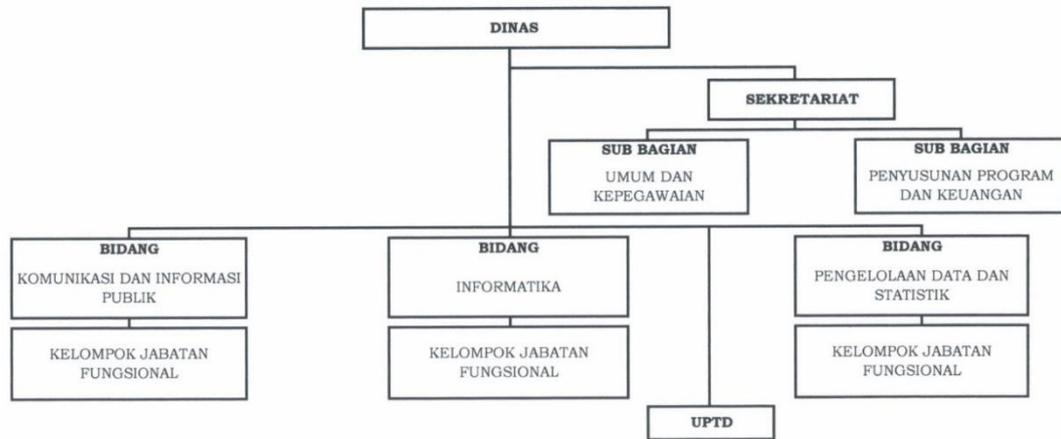
1. Perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang informatika;
2. Perumusan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
3. Pelaksanaan pengelolaan hosting, layanan domain, sub-domain, nama domain perangkat daerah dan pemerintah kabupaten;
4. Pelaksanaan pengelolaan pusat data (*data center*) Kabupaten Mojokerto;
5. Pelaksanaan sistem jaringan dan intra Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan manajemen data dan informasi elektronik;
8. Pelaksanaan jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan atau nirsangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
9. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;

10. Pengembangan dan pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
11. Pengembangan ekosistem kabupaten cerdas;
12. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
15. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi survei dan akuisisi data, statistik serta evaluasi dan diseminasi data. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang pengelolaan data dan statistik;
2. Pelaksanaan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan tugas sebagai wali data dalam penyelenggaraan satu data tingkat daerah;
4. Pelaksanaan survei dan akuisisi data;
5. Pelaksanaan pengolahan dan analisa data statistik;
6. Pelaksanaan evaluasi dan diseminasi data;

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 90 Tahun 2021



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

## BAB III

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

#### 3.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

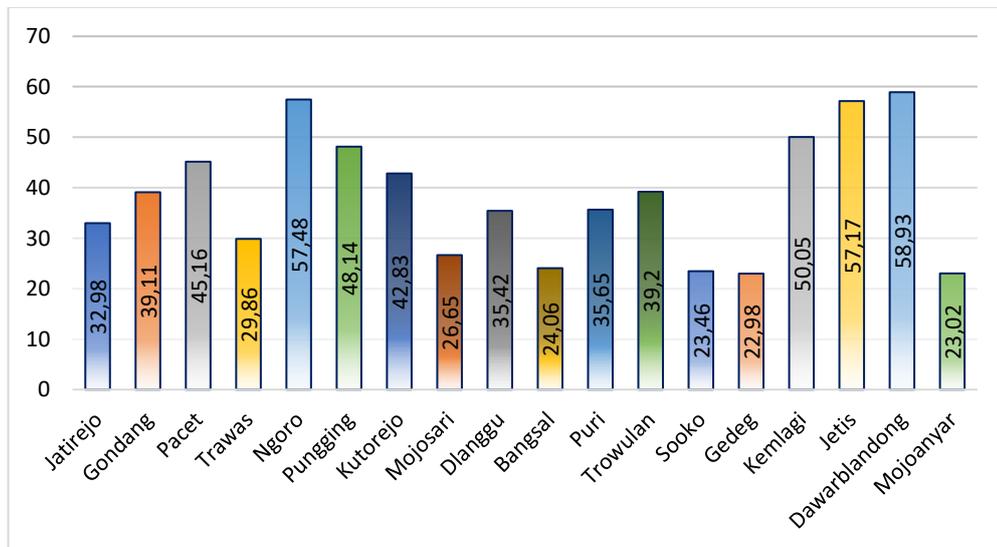
Luas wilayah Kabupaten Mojokerto 692,15 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur, yang seluruhnya berupa dataran. Secara administratif Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 299 desa dan 5 kelurahan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Kabupaten Mojokerto

| No            | Kecamatan     | Kelurahan | Jumlah     |              |
|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|
|               |               |           | Desa       | Dusun        |
| 1             | Jatirejo      | -         | 19         | 58           |
| 2             | Gondang       | -         | 18         | 71           |
| 3             | Pacet         | -         | 20         | 79           |
| 4             | Trawas        | -         | 13         | 29           |
| 5             | Ngoro         | -         | 19         | 67           |
| 6             | Pungging      | -         | 19         | 87           |
| 7             | Kutorejo      | -         | 17         | 108          |
| 8             | Mojosari      | 5         | 14         | 53           |
| 9             | Bangsalsari   | -         | 17         | 49           |
| 10            | Mojoanyar     | -         | 12         | 44           |
| 11            | Dlanggu       | -         | 16         | 80           |
| 12            | Puri          | -         | 16         | 68           |
| 13            | Trowulan      | -         | 16         | 61           |
| 14            | Sooko         | -         | 15         | 42           |
| 15            | Gedeg         | -         | 14         | 48           |
| 16            | Kemlagi       | -         | 20         | 76           |
| 17            | Jetis         | -         | 16         | 80           |
| 18            | Dawarblandong | -         | 18         | 76           |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>5</b>  | <b>299</b> | <b>1.176</b> |

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2022

Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.1** Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan

Sumber : Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2022

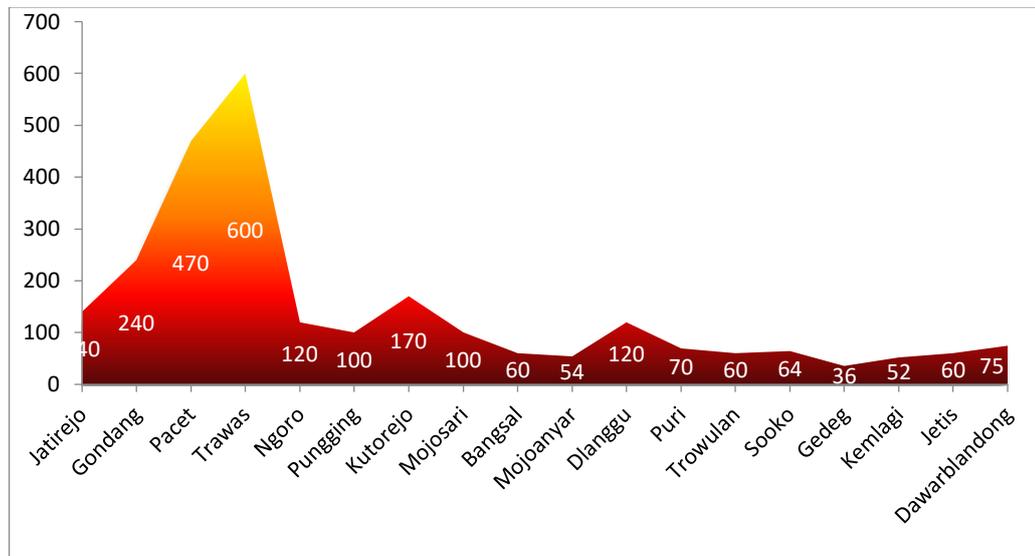
Adapun Kecamatan yang memiliki luas terluas adalah Kecamatan Dawarblandong yakni seluas 58,93 km<sup>2</sup>. Kecamatan Ngoro memiliki luas wilayah seluas 57,48 km<sup>2</sup>. Kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Gedeg yakni seluas 22,98 km<sup>2</sup> (BPS, 2022).

### 3.2 Kondisi Geografis dan Topografi

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, secara geografis terletak di antara 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" bujur timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47'30" lintang selatan. Kabupaten Mojokerto sama sekali tidak memiliki wilayah berupa perairan atau laut. Secara geografis Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya.



Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah daratan, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.



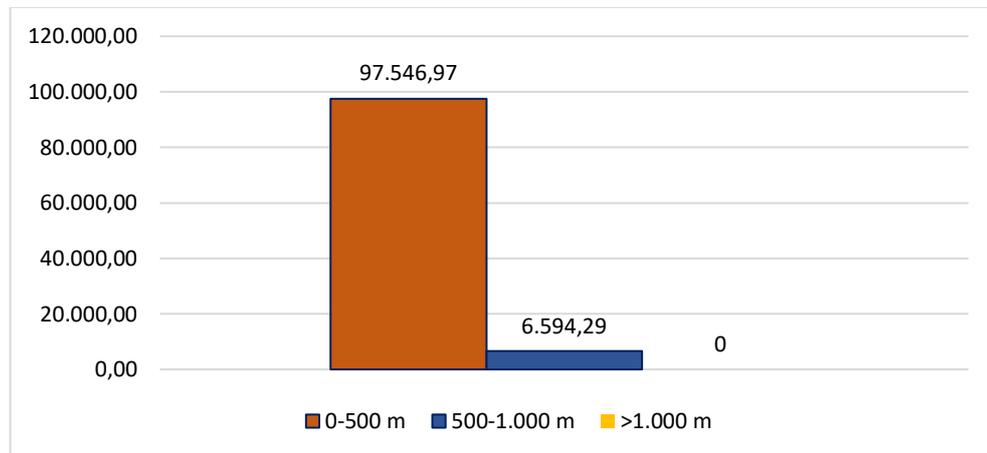
**Gambar 3.3** Tinggi Wilayah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan

Sumber : Kabupaten Mojokerto Dalam Angka Tahun 2022

Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15 derajat. Pada umumnya ketinggian wilayah kecamatan di Kabupaten Mojokerto rata-rata 64 m (<500 m) di atas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang berbeda dari kecamatan lain yaitu Kecamatan Pacet 470 m dan Kecamatan Trawas 600 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 15 sampai dengan di atas 500 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan dari permukaan laut merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis peruntukannya, oleh karena itu ketinggian lahan merupakan salah satu penentu dalam memetakan dan kemudian menetapkan wilayah tanah usaha.

Adapun luas daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketinggian tempat adalah sebagai berikut.



**Gambar 3.4** Luas Lahan Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Letak Ketinggian

Sumber : Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2022

- Ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut, merupakan daerah datar dan sedikit sekali daerah yang bergelombang dengan penggunaan lahan usaha pertanian/persawahan, meliputi hampir seluruh kecamatan;
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut, merupakan daerah yang relatif bergelombang dan berbukit. Daerah ini juga merupakan daerah persawahan dan tegal, dan yang termasuk dalam ketinggian ini hanya Kecamatan Trawas.

Ditinjau dari kemiringan tanahnya, Kabupaten Mojokerto dapat dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

- a. Kemiringan I seluas 47.591,30 hektar atau 48,70 persen, merupakan tanah berupa lereng dengan kemiringan 0-2 derajat yang banyak dijumpai di Kecamatan Jetis, Kemlagi, Trowulan, dan Dawarblandong.

- b. Kemiringan II seluas 22.072 hektar atau 22,26 persen, merupakan tanah berupa lereng dengan kemiringan 2-15 derajat yang banyak terdapat di Kecamatan Dawarblandong, Kutorejo, dan Pacet.
- c. Kemiringan III seluas 8.474 hektar atau 8,6 persen merupakan tanah lereng dengan kemiringan 15 – 40 derajat. Tanah tersebut banyak dijumpai di Kecamatan Pacet dan Trawas.
- d. Kemiringan IV seluas 19.409 hektar atau 19,8 persen, merupakan tanah lereng dengan kemiringan lebih dari 40 derajat dan banyak dijumpai di Kecamatan Gondang, Pacet, dan Trawas..

### **3.3 Aspek Demografi**

Sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 1.119.209 jiwa dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 1.125.522 jiwa penduduk. Adapun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto sebesar 0,42 persen. Persentase penduduk terbesar berada di Kecamatan Jetis dengan proporsi 7,70 persen atau 86.621 jiwa dan persentase penduduk terkecil berada di Trawas dengan proporsi 2,76 persen atau 31.011 jiwa (BPS, 2022).

Luas wilayah Kabupaten Mojokerto sekitar 97.546,97 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk rata-rata 1.6.26 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Sooko dan kepadatan terendah terjadi di Kecamatan Dawarblandong. Berikut adalah rincian data penduduk Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 3.2** Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

| Kecamatan                  | Jumlah Penduduk (jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | Persentase Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Jatirejo                   | 44.325                 | 0,53                          | 3,94                    | 1.344                                      |
| Gondang                    | 43.119                 | 0,50                          | 3,83                    | 1.103                                      |
| Pacet                      | 58.913                 | 0,50                          | 5,23                    | 1.305                                      |
| Trawas                     | 31.011                 | 0,41                          | 2,76                    | 1.039                                      |
| Ngoro                      | 85.431                 | 0,28                          | 7,59                    | 1.486                                      |
| Pungging                   | 79.258                 | 0,45                          | 7,04                    | 1.646                                      |
| Kutorejo                   | 66.977                 | 0,81                          | 5,95                    | 1.564                                      |
| Mojosari                   | 78.176                 | 0,17                          | 6,95                    | 2.933                                      |
| Bangsals                   | 51.103                 | 0,41                          | 4,54                    | 2.124                                      |
| Mojoanyar                  | 50.808                 | 0,40                          | 4,51                    | 2.207                                      |
| Dlanggu                    | 55.733                 | 0,52                          | 4,95                    | 1.573                                      |
| Puri                       | 78.532                 | 0,52                          | 6,98                    | 2.203                                      |
| Trowulan                   | 74.829                 | 0,42                          | 6,65                    | 1.909                                      |
| Sooko                      | 75.278                 | 0,40                          | 6,69                    | 3.209                                      |
| Gedek                      | 56.708                 | 0,29                          | 5,04                    | 2.468                                      |
| Kemlagi                    | 58.016                 | 0,56                          | 5,15                    | 1.159                                      |
| Jetis                      | 86.621                 | 0,33                          | 7,70                    | 1.515                                      |
| Dawarblandong              | 50.684                 | 0,21                          | 4,50                    | 860  |
| <b>Kabupaten Mojokerto</b> | <b>1.125.522</b>       | <b>0,41</b>                   | <b>100</b>              | <b>1.626</b>                               |

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2022

Penduduk di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 berjumlah 1.125.522 orang dan didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 566.019 jiwa (51%) sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 559.503 jiwa (49%).

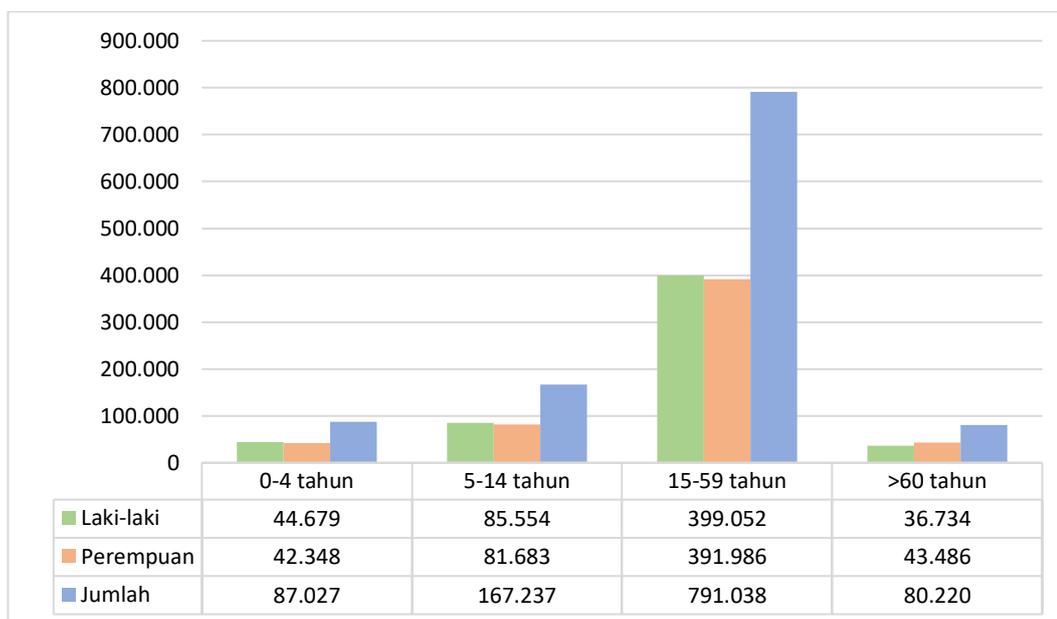
**Tabel 3.3** Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mojokerto

| No | Kelompok Umur | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----|---------------|---------------|-----------|--------|
|    |               | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1  | 0-4           | 44.679        | 42.348    | 87.027 |
| 2  | 5-9           | 42.850        | 41.267    | 84.117 |
| 3  | 10-14         | 42.704        | 40.416    | 83.120 |
| 4  | 15-19         | 41.796        | 40.193    | 81.989 |
| 5  | 20-24         | 42.163        | 40.985    | 83.148 |
| 6  | 25-29         | 45.478        | 43.632    | 89.110 |
| 7  | 30-34         | 44.704        | 42.415    | 87.119 |
| 8  | 35-39         | 43.754        | 42.338    | 86.092 |
| 9  | 40-44         | 41.709        | 41.186    | 82.895 |
| 10 | 45-49         | 41.459        | 42.588    | 84.047 |
| 11 | 50-54         | 39.267        | 39.959    | 79.226 |
| 12 | 55-59         | 33.245        | 33.269    | 66.514 |
| 13 | 60-64         | 25.477        | 25.421    | 50.898 |

| No                         | Kelompok Umur | Jenis Kelamin  |                | Jumlah           |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                            |               | Laki-Laki      | Perempuan      |                  |
| 14                         | 65-69         | 17.289         | 18.328         | 35.617           |
| 15                         | 70-74         | 10.162         | 11.762         | 21.924           |
| 16                         | 75+           | 9.283          | 13.396         | 22.679           |
| <b>Kabupaten Mojokerto</b> |               | <b>566.019</b> | <b>559.503</b> | <b>1.125.522</b> |

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2022

Pengelompokkan penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan usia, dikelompokkan menjadi 4 kelompok usia, usia balita (0-4 tahun) sebanyak 88.367 jiwa, anak-anak (5-14 tahun) sebanyak 173.944 jiwa, usia produktif (15-59 tahun) sebanyak 756.288 jiwa, dan lansia (>60 tahun) sebanyak 163.149 jiwa.



Gambar 3.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Usia

Sumber : Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2022

### 3.4 Pendidikan

Jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, ketiga jalur pendidikan tersebut dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jenjang pendidikan formal terdiri

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pendidikan yang terdapat di Kabupaten Mojokerto bersifat formal/umum, yaitu meliputi pembelajaran TK/RA, tingkat dasar SD/MI, tingkat menengah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta.

**Tabel 3.4** Sarana Pendidikan di Kabupaten Mojokerto

| Kecamatan                  | TK/RA      | SD/MI      | SMP/MTs    | SMA/SMK/MA | PT        |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Jatirejo                   | 32         | 33         | 11         | 7          | 1         |
| Gondang                    | 21         | 24         | 8          | 8          | -         |
| Pacet                      | 34         | 37         | 13         | 10         | 3         |
| Trawas                     | 17         | 19         | 5          | 5          | -         |
| Ngoro                      | 46         | 45         | 14         | 8          | -         |
| Pungging                   | 39         | 37         | 15         | 12         | 3         |
| Kutorejo                   | 40         | 42         | 16         | 7          | -         |
| Mojosari                   | 48         | 41         | 18         | 20         | 2         |
| Bangsals                   | 35         | 32         | 9          | 5          | 1         |
| Mojoanyar                  | 31         | 25         | 4          | 3          | 1         |
| Dlanggu                    | 37         | 31         | 7          | 5          | -         |
| Puri                       | 47         | 37         | 13         | 10         | -         |
| Trowulan                   | 37         | 35         | 14         | 10         | 1         |
| Sooko                      | 39         | 32         | 17         | 13         | 2         |
| Gedeg                      | 27         | 35         | 10         | 4          | -         |
| Kemlagi                    | 32         | 36         | 10         | 8          | 1         |
| Jetis                      | 49         | 45         | 15         | 9          | -         |
| Dawarblandong              | 32         | 37         | 11         | 7          | -         |
| <b>Kabupaten Mojokerto</b> | <b>639</b> | <b>621</b> | <b>205</b> | <b>148</b> | <b>15</b> |

Sumber : Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui sebaran jumlah sekolah TK/RA di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 639 sekolah, Kecamatan Jetis menjadi kecamatan dengan jumlah sekolah TK/RA terbanyak di Kabupaten Mojokerto yakni 49 sekolah. Sebaran jumlah sekolah SD/MI di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 621 sekolah, Kecamatan Jetis menjadi kecamatan dengan jumlah sekolah SD/MI terbanyak di Kabupaten Mojokerto yakni 45 sekolah. Jumlah

sekolah SMP/MTs di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 205 sekolah, Kecamatan Mojosari menjadi kecamatan dengan jumlah sekolah SMP/MTs terbanyak di Kabupaten Mojokerto yakni 18 sekolah. Sebaran jumlah sekolah SMA/SMK/MA di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 148 sekolah, Kecamatan Mojosari menjadi kecamatan dengan jumlah sekolah SMA/SMK/MA terbanyak di Kabupaten Mojokerto yakni 20 sekolah. Kabupaten Mojokerto memiliki 15 unit perguruan tinggi yang terdapat di Kecamatan Jatirejo, Pacet, Pungging, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Trowulan, Sooko, dan Kemlagi.

### **3.5 Kesehatan**

Salah satu tujuan pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Selain dari sisi ekonomi, kualitas hidup seseorang juga ditentukan oleh kualitas kesehatannya. Oleh karena itu, segala upaya dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun dan melengkapi sarana prasarana kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan.

Fasilitas kesehatan semakin mudah diakses dengan tersedianya Puskesmas di setiap kecamatan dan di sebagian besar kelurahan juga sudah tersedia Puskesmas Pembantu. Selain itu pemerintah juga mengupayakan pelayanan kesehatan gratis bagi mereka yang tidak mampu melalui program Jamkesmas dan Jamkesda.

Tabel 3.5 Sarana Kesehatan di Kabupaten Mojokerto

| Kecamatan                  | Rumah Sakit | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu |
|----------------------------|-------------|----------------------|------------|-----------|--------------------|
| Jatirejo                   | -           | -                    | -          | 1         | 4                  |
| Gondang                    | 1           | -                    | -          | 1         | 4                  |
| Pacet                      | 1           | -                    | 3          | 3         | 3                  |
| Trawas                     | 2           | -                    | 1          | 1         | 2                  |
| Ngoro                      | 2           | -                    | 2          | 2         | 4                  |
| Pungging                   | -           | -                    | 2          | 2         | 3                  |
| Kutorejo                   | -           | -                    | 1          | 2         | 3                  |
| Mojosari                   | 3           | -                    | 7          | 2         | 2                  |
| Bangsalsari                | 1           | -                    | 2          | 1         | 2                  |
| Mojoanyar                  | 1           | -                    | 3          | 1         | 3                  |
| Dlanggu                    | 1           | -                    | 1          | 1         | 3                  |
| Puri                       | 1           | 1                    | 6          | 1         | 3                  |
| Trowulan                   | -           | -                    | 3          | 2         | 2                  |
| Sooko                      | 2           | -                    | 1          | 1         | 3                  |
| Gedeg                      | 1           | 1                    | 1          | 2         | 3                  |
| Kemlagi                    | 3           | -                    | 2          | -         | 2                  |
| Jetis                      | -           | -                    | 3          | 2         | 3                  |
| Dawarblondong              | -           | -                    | 1          | 1         | 3                  |
| <b>Kabupaten Mojokerto</b> | <b>19</b>   | <b>2</b>             | <b>39</b>  | <b>26</b> | <b>52</b>          |

Sumber : Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa terdapat 138 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 19 unit Rumah Sakit, 2 unit Rumah Sakit Bersalin, 39 Poliklinik, 26 unit Puskesmas, dan 52 unit Puskesmas Pembantu yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.



**BAB IV**  
**METODE**  
**PENELITIAN**

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Terhadap Dokumen RPJMD dan SDGs Kabupaten Mojokerto adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung.

#### **4.2 Langkah-Langkah Kegiatan**

Langkah-langkah dalam Kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Terhadap Dokumen RPJMD dan SDGs Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Menyusun konsep metadata dan standar data;
2. Mempersiapkan formulir metadata dan kerangka standar data;
3. Mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan penyusunan metadata dan standar data baik dari OPD terkait ataupun dokumen-dokumen lain yang mendukung;
4. Menyusun laporan kegiatan penyusunan metadata dan standar data RPJMD dan SDGs Kabupaten Mojokerto;
5. Melakukan validasi data yang telah disusun ke dalam laporan oleh masing-masing OPD;
6. Melakukan perbaikan laporan penyusunan metadata dan standar data sesuai dengan validasi data;

7. Laporan penyusunan metadata dan standar data RPJMD dan SDGs Kabupaten Mojokerto telah siap untuk dipublikasikan;
8. Melakukan upload dokumen metadata dan standar data ke portal Satu data Palapa Kabupaten Mojokerto.



# **BAB V**

# **PEMBAHASAN**

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu:

- a. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
- b. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;

- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegras, akuntabel, bersih, transparan;
- d. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

RPJMD selanjutnya menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun yang memuat tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disusun dalam RPJMD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sesuai dengan dokumen RPJMD, organisasi perangkat daerah memiliki data-data pendukung dokumen RPJMD yang kemudian dibuat Metadata Indikator, Metadata Variabel, dan Standar Data, dengan rekapitulasi sebagai berikut.

**Tabel 5.1** Rekapitulasi Pengerjaan Dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026

|                    | <b>Total Data</b> |
|--------------------|-------------------|
| Datasets           | 479               |
| Metadata Variabel  | 479               |
| Metadata Indikator | 44                |
| Standar Data       | 479               |
| Kode SDSN          | 47                |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa total datasets dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 sebanyak 479 datasets, dengan jumlah metadata variabel yang tersusun sebanyak 479 dataset, metadata indikator yang tersusun sebanyak 44 datasets, dan standar data yang tersusun sebanyak 479 datasets. Dari 479 standar data sebanyak 47 datasets telah memiliki kode SDSN.

Berikut merupakan rincian dari rekapitulasi penyusunan metadata statistik variabel, metadata statistik indikator, dan standar data terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

**Tabel 5.2** Rekapitulasi Penyusunan Metadata Statistik Variabel, Metadata Statistik Indikator, dan Standar Data Terhadap Dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026

| <b>No.</b> | <b>Nama Data</b>                | <b>OPD</b>   | <b>MS-Var</b> | <b>MS-Ind</b> | <b>Standar Data</b> | <b>Kode SDSN</b> | <b>Dokumen</b> |
|------------|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|
| 1          | Indeks Profesionalitas ASN      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √             | √             | √                   |                  | Terlampir      |
| 2          | Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √             |               | √                   |                  | Terlampir      |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 3   | Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 4   | Jumlah ASN Sesuai Kompetensi   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 5   | Jumlah ASN Menurut Pendidikan  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √      |        | √            | SD00684.00.00 | Terlampir |
| 6   | Jumlah Kejadian Konflik Keagamaan  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 7   | Jumlah LSM atau Ormas yang Aktif   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 8   | Jumlah LSM atau Ormas yang Terdaftar   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 9   | Jumlah Peserta yang Diundang Sosialisasi terkait Pemilu, Politik, dan Rencana Aksi HAM | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 10  | Jumlah Peserta yang Diundang Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 11  | Jumlah Peserta yang Hadir Sosialisasi terkait Pemilu, Politik, dan Rencana Aksi HAM    | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 12  | Jumlah Peserta yang Hadir Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 13  | Jumlah Kejadian Konflik Sosial   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 14  | Data Seluruh Kejadian Bencana  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                 | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 15  | Jumlah Kejadian Bencana yang Ditangani sesuai Waktu Tanggap                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 16  | Jumlah Kejadian Kebakaran yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap                  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            | SP00099.00.00 | Terlampir |
| 17  | Jumlah Seluruh Kejadian Kebakaran  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            | SP00099.00.00 | Terlampir |
| 18  | Jumlah Seluruhan Laporan Kondisi Membahayakan Manusia yang Diterima            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 19  | Jumlah Operasi Non Kebakaran yang Dilakukan                                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 20  | Jumlah Seluruh Kejadian Bencana  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 21  | Indeks Risiko Bencana  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      | √      | √            | SD00765.01.00 | Terlampir |
| 22  | Jumlah Infrastruktur Rusak Karena Bencana yang Ditangani Berdasarkan Kecamatan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 23  | Jumlah Seluruh Infrastruktur Rusak Karena Bencana Berdasarkan Kecamatan        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 24  | Jumlah Seluruh Destana   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 25  | Jumlah Destana Memiliki EWS Berfungsi Baik Berdasarkan Kecamatan               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 26  | Data Indeks Kepuasan Masyarakat  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 27  | Realisasi Penerimaan PAD   | Badan Pendapatan Daerah             | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                    | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 28  | Target Penerimaan PAD Berdasarkan Perangkat Daerah Penghasil | Badan Pendapatan Daerah                | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 29  | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah        | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 30  | Jumlah OPD yang Menerapkan Pengelolaan BMD Sesuai Ketentuan  | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 31  | Jumlah OPD yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Sesuai SAP   | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 32  | Jumlah Pendapatan Daerah                                     | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 33  | Jumlah APBD  | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 34  | Jumlah OPD   | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 35  | Indeks Kesalehan Sosial                                      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 36  | Jumlah Target Dokumen Perencanaan yang Tersusun              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 37  | Jumlah Kajian yang Sudah Dilaksanakan                        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 38  | Jumlah Kajian yang Ditindaklanjuti                           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 39  | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)                        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | √      | √      | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 40  | Jumlah Target Ketersediaan Data Perencanaan                  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah           | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 41  | Indeks GINI  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah           | √      | √      | √            | SD00622.01.00 | Terlampir |
| 42  | Jumlah Realisasi Ketersediaan Data Perencanaan               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah           | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 43  | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun                     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah           | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 44  | Jumlah Program Bagian Hukum                                  | Bagian Hukum Sekretariat Daerah                | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 45  | Jumlah Capaian Program Bagian Hukum                          | Bagian Hukum Sekretariat Daerah                | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 46  | Jumlah Produk Hukum yang Ditindaklanjuti Bagian Hukum        | Bagian Hukum Sekretariat Daerah                | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 47  | Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan Bagian Hukum             | Bagian Hukum Sekretariat Daerah                | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 48  | Jumlah Kebijakan yang Ditetapkan Bagian Kesejahteraan Rakyat | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 49  | Jumlah Kebijakan yang Diusulkan Bagian Kesejahteraan Rakyat  | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 50  | Indeks Kerukunan Umat Beragama Bagian Kesejahteraan Rakyat   | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 51  | Jumlah Capaian Program Bagian Kesejahteraan Rakyat           | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 52  | Jumlah Program Bagian Kesejahteraan Rakyat                   | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 53  | Nilai SAKIP Bagian Organisasi                                | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah           | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD   | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 54  | Realisasi Anggaran Bagian Organisasi                         | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah                | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 55  | Pagu Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah           | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah                | √      |        | √            | SD00175.00.00 | Terlampir |
| 56  | Nilai SAKIP Bagian Pembangunan                               | Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah               | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 57  | Jumlah Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Kinerja         | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 58  | Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto               | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 59  | Maturitas Penerapan UKPBJ                                    | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 60  | Jumlah Pengadaan yang terselesaikan                          | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 61  | Jumlah Pengajuan Pengadaan yang Masuk                        | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 62  | Prosentase Peningkatan Laba BUMD                             | Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 63  | Realisasi Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA               | Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 64  | Pagu Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah | Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah      | √      |        | √            | SD00175.00.00 | Terlampir |
| 65  | Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan           | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah  | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 66  | Nilai SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan                        | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah         | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 67  | Pagu Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah   | Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah         | √      |        | √            | SD00175.00.00 | Terlampir |
| 68  | Realisasi Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan         | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 69  | Pagu Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan              | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah | √      |        | √            | SD00175.00.00 | Terlampir |
| 70  | Nilai SAKIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 71  | Realisasi Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah                  | Bagian Umum Sekretariat Daerah                             | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 72  | Pagu Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah                       | Bagian Umum Sekretariat Daerah                             | √      |        | √            | SD00175.00.00 | Terlampir |
| 73  | Nilai SAKIP Bagian Umum Sekretariat Daerah                         | Bagian Umum Sekretariat Daerah                             | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 74  | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 75  | Jumlah Kematian yang Dilaporkan                                    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 76  | Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran                                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 77  | Jumlah Kepemilikan Akta Kematian                                   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | √      |        | √            | SP00131.00.00 | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 78  | Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian (Non Muslim)                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            | SP00310.00.00 | Terlampir |
| 79  | Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan (Non Muslim)                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 80  | Jumlah Kepemilikan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia)          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 81  | Jumlah Pagu Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            | SD00175.00.00 | Terlampir |
| 82  | Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            | SD00282.01.01 | Terlampir |
| 83  | Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto yang Wajib Memiliki e-KTP                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 84  | Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto yang sudah memiliki e-KTP Berdasarkan Kecamatan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 85  | Jumlah Penduduk Non Muslim yang Berstatus Cerai Hidup                               | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            | SP00119.00.00 | Terlampir |
| 86  | Jumlah Penduduk Non Muslim yang Berstatus Kawin                                     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            | SD00822.01.00 | Terlampir |
| 87  | Jumlah Penduduk Pindah Datang yang Dilaporkan                                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 88  | Jumlah Penduduk Usia 0 - 18 Tahun   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 89  | Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 90  | Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 91  | Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 92  | Jumlah Penduduk yang Memiliki KIA  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 93  | Jumlah Penduduk yang Memiliki KK   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            | SP00228.00.00 | Terlampir |
| 94  | Jumlah Penduduk yang Wajib Memiliki KIA (Berusia 0-17 Tahun)                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 95  | Jumlah Penduduk yang Wajib Memiliki KK   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            | SP00228.00.00 | Terlampir |
| 96  | Jumlah Target Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 97  | Angka Harapan Hidup  | Dinas Kesehatan                         | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 98  | Jumlah Indikator SPM   | Dinas Kesehatan                         | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 99  | Jumlah Indikator SPM yang Mencapai Target  | Dinas Kesehatan                         | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 100 | Jumlah Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) | Dinas Kesehatan                         | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD             | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 101 | Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Standar Kesehatan                           | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 102 | Penghargaan Swasti Saba  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 103 | Jumlah dan Jenis Alkes Sesuai Standar  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 104 | Jumlah Alkes yang Ada  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 105 | Jumlah Apotek  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SP00077.00.00 | Terlampir |
| 106 | Jumlah Apotek yang Memenuhi Standar Kesehatan  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SP00077.00.00 | Terlampir |
| 107 | Jumlah Balita Pendek   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 108 | Jumlah Balita Sangat Pendek  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 109 | Jumlah Balita yang Diukur  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 110 | Jumlah dan Jenis Obat yang Sesuai Standar Pornas   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 111 | Jumlah Desa Open Defecation Free (ODF)   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 112 | Jumlah Desa yang Mengalami KLB   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 113 | Jumlah Faskes  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 114 | Jumlah Faskes yang Terakreditasi Paripurna   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 115 | Jumlah Kasus Kematian Perempuan Diakibatkan oleh Proses yang Berhubungan dengan Kehamilan Persalinan | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 116 | Jumlah Kelahiran Hidup   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 117 | Jumlah Kunjungan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD             | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 118 | Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di Fasilitas Kesehatan  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 119 | Jumlah Obat yang ada di Sarana Fasilitas Kesehatan   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 120 | Jumlah Pengajuan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 121 | Jumlah Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD01814.01.00 | Terlampir |
| 122 | Jumlah Rumah Tangga Berpola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 123 | Jumlah Rumah Tangga yang Disurvei (PHBS)   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 124 | Jumlah Seluruh Kematian Bayi dalam Kurun (1-11 Bulan )   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 125 | Jumlah Seluruh Kunjungan di Fasilitas Kesehatan  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 126 | Jumlah Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mojokerto  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD01814.01.00 | Terlampir |
| 127 | Jumlah Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) yang Diterbitkan   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 128 | Jumlah Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Syarat atau Standar Kesehatan | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                              | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|---|----------------------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 129 | Jumlah Toko Obat  | Dinas Kesehatan                  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 130 | Jumlah Toko Obat yang Memenuhi Standar Kesehatan  | Dinas Kesehatan                  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 131 | Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)   | Dinas Kesehatan                  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 132 | Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang Aktif  | Dinas Kesehatan                  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 133 | Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Dinas Kesehatan                  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 134 | Indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika  | Dinas Komunikasi dan Informatika | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 135 | Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 136 | Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Nama Domain, Sub Domain, dan E-Government                        | Dinas Komunikasi dan Informatika | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 137 | Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Persandian   | Dinas Komunikasi dan Informatika | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 138 | Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota            | Dinas Komunikasi dan Informatika | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 139 | Target Program Aplikasi Informatika   | Dinas Komunikasi dan Informatika | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 140 | Target Program Informasi dan Komunikasi Publik  | Dinas Komunikasi dan Informatika | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                              | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|----------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 141 | Target Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 142 | Target Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | Dinas Komunikasi dan Informatika | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 143 | Jumlah Koperasi yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi               | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 144 | Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan                                 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 145 | Jumlah Koperasi Aktif  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | √      |        | √            | SE00285.00.00 | Terlampir |
| 146 | Jumlah Koperasi Sehat  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 147 | Jumlah Koperasi yang Berkualitas                                     | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 148 | Jumlah Seluruh KSP - USP   | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 149 | Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan              | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 150 | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Difalिसitasi Pengembangan Usaha        | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 151 | Jumlah Usaha Mikro Aktif   | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | √      |        | √            | SE00365.00.00 | Terlampir |
| 152 | Jumlah Sampah yang Tertangani  | Dinas Lingkungan Hidup           | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 153 | Jumlah Total Timbulan Sampah Kabupaten Mojokerto                     | Dinas Lingkungan Hidup           | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 154 | Jumlah sampah yang terkelola melalui 3R                              | Dinas Lingkungan Hidup           | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 155 | Jumlah Lembaga Masyarakat Di Kabupaten Mojokerto                     | Dinas Lingkungan Hidup           | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 156 | Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Diawasi                          | Dinas Lingkungan Hidup           | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                    | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 157 | Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Diawasi yang Taat   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 158 | Jumlah Dokumen yang Seharusnya Tersedia   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 159 | Jumlah Total Limbah B3 Kabupaten yang Dihasilkan Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin dan Dilaporkan di Aplikasi SIRAJA | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 160 | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pengetahuan Dibidang Lingkungan  | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 161 | Jumlah RTH yang Seharusnya Dikelolan Di seluruh Kecamatan   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            | SD01040.00.00 | Terlampir |
| 162 | Jumlah Lembaga atau Masyarakat yang Memenuhi Kriteria Penghargaan LH  | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 163 | Jumlah Peningkatan Luas Lahan Terpulihkan   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 164 | Jumlah Luas RTH (Taman) yang Dikelola   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 165 | Limbah B3 yang Dikumpulkan dan Dikelola Lebih Lanjut  | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 166 | Jumlah Limbah B3 yang Disimpan di TPS Limbah B3   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 167 | Jumlah Lahan Kritis Terdata   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            | SD00281.00.00 | Terlampir |
| 168 | Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Teregistrasi ke DLH  | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 169 | Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk ke DLH yang Tertangani                        | Dinas Lingkungan Hidup                  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 170 | Indeks Kualitas Udara  | Dinas Lingkungan Hidup                  | √      | √      | √            | SD00674.02.02 | Terlampir |
| 171 | Indeks Kualitas Air  | Dinas Lingkungan Hidup                  | √      | √      | √            | ST00720.00.00 | Terlampir |
| 172 | Indeks Kualitas Lahan  | Dinas Lingkungan Hidup                  | √      | √      | √            | ST00732.00.00 | Terlampir |
| 173 | Jumlah Dokumen yang Tersedia   | Dinas Lingkungan Hidup                  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 174 | Jumlah Lembaga Atau Masyarakat Yang Mengikuti Lomba Untuk Mendapatkan Penghargaan LH | Dinas Lingkungan Hidup                  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 175 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya   | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 176 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap  | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 177 | Jumlah Lumbung Pangan  | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 178 | Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani  | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 179 | Jumlah Desa Rawan Pangan   | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 180 | Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan             | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 181 | Skor Pola Pangan Harapan   | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 182 | Jumlah Kecamatan   | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 183 | Jumlah Pembangunan Lumbung Pangan Baru   | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 184 | Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan   | Dinas Pangan dan Perikanan              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 185 | Jumlah Infrastruktur Kondisi Baik  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|---|---|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 186 | Panjang drainase yang harus dibangun  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 187 | Jumlah keseluruhan infrastruktur Kabupaten Mojokerto                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 188 | Jumlah Panjang Jalan Kondisi Baik   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 189 | Jumlah Keseluruhan Panjang Jalan Kabupaten Mojokerto                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 190 | Panjang drainase yang dibangun  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 191 | Jumlah bangunan gedung instansi pemerintah  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 192 | Jumlah keseluruhan gedung di Kabupaten Mojokerto  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 193 | Jumlah Bangunan Gedung yang Sesuai dengan Dokumen RTBL                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 194 | Jumlah Bangunan Gedung Instansi Pemerintah yang Memiliki Laik Fungsi yang Masih Berlaku | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 195 | Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten yg Dilayani oleh Jaringan Irigasi yg Dikelola         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 196 | Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Mojokerto                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 197 | Jumlah Realisasi Unit Pemerintah Lokal yang Menerbitkan dan Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air dan Sanitasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 198 | Jumlah Tenaga Terampil pada Badan Usaha Bidang Kontruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 199 | Jumlah Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya Diolah di IPALD  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 200 | Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya Telah Diolah di PLT   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 201 | Jumlah Keseluruhan Tenaga Terampil pada Badan Usaha Bidang Kontruksi  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 202 | Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            | SD01108.00.00 | Terlampir |
| 203 | Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Rumah Tangganya Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Terlindungi di Kabupaten Mojokerto                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 204 | Jumlah Indikasi Program dalam Dokumen Rencana Tata Ruang  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 205 | Jumlah Desa di Wilayah Kabupaten Tersedia TPS atau TPST atau TPS3R  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            | SD00251.01.00 | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 206 | Jumlah Kegiatan Pembangunan atau peningkatan Kualitas Infrastruktur ke PU an (dalam DPA)  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 207 | Indeks Desa Membangun   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 208 | Jumlah Kerjasama Desa   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 209 | Jumlah Desa dengan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintah Desa Secara Tepat                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      |        | √            | SD00496.01.00 | Terlampir |
| 210 | Jumlah Kerjasama Desa Tahun n-1   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 211 | Data Jumlah Desa  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      |        | √            | SD00496.01.00 | Terlampir |
| 212 | Data Jumlah Kepala Desa Maret-Agustus 2022  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 213 | Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa yang Dilaksanakan                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 214 | Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa yang Harus Dilaksanakan Sampai Akhir Periode Renstra | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 215 | Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 216 | Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Ada  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD   | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|---|---|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 217 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan dan Lembaga Adat yang Aktif        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa          | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 218 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan dan Lembaga Adat yang Difasilitasi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa          | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 219 | Daya Tarik Wisata yang Dipelihara   | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 220 | Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan                | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 221 | Jumlah Cagar Budaya yang Dipelihara   | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 222 | Jumlah Kesenian Tradisional di Kabupaten Mojokerto                              | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 223 | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina   | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 224 | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Berdasarkan Kecamatan                          | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 225 | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dibina                                    | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 226 | Jumlah PAD Sektor Pariwisata  | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 227 | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina                                       | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 228 | Jumlah SDM Pariwisata yang Dibina   | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 229 | Jumlah Seluruh Pelaku Ekonomi Kreatif  | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 230 | Jumlah Seluruh SDM Pariwisata  | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 231 | Jumlah Wisatawan   | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 232 | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 233 | Nilai Realisasi Investasi  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 234 | Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang Masuk  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 235 | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 236 | Jumlah Investor Baru yang Masuk  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 237 | Nilai Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya (n-1)   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 238 | Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Sudah Tamat atau Sedang Belajar di Pendidikan Kesetaraan | Dinas Pendidikan                                       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 239 | Harapan Lama Sekolah   | Dinas Pendidikan                                       | √      | √      | √            | SP00139.00.00 | Terlampir |
| 240 | Jumlah Anak Didik PAUD Usia 0-6 Tahun  | Dinas Pendidikan                                       | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 241 | Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah | Dinas Pendidikan   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 242 | Jumlah Siswa (SD, MI) Usia 7-12 Tahun  | Dinas Pendidikan   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 243 | Jumlah Siswa (SMP, MTS) Usia 13-15 Tahun   | Dinas Pendidikan   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 244 | Rata-Rata Lama Sekolah   | Dinas Pendidikan   | √      | √      | √            | SD01056.00.00 | Terlampir |
| 245 | Jumlah Peserta KB Aktif  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            | SD00878.00.00 | Terlampir |
| 246 | Jumlah Kepala Desa atau Kelurahan yang Mendapat Pelatihan PUG                      | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 247 | Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Perlindungan                                     | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 248 | Indeks Pembangunan Gender  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 249 | Jumlah Kelompok Tribina, PIK R, UPPKS yang Ada                                     | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 250 | Jumlah Kelompok Tribina, PIK R, UPPKS yang Aktif                                   | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 251 | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)   | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 252 | Jumlah Data Keluarga Program Bangga Kencana yang Dilaporkan                      | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 253 | Jumlah OPD yang Melaksanakan Kebijakan PPRG                                      | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 254 | Jumlah OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak                           | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 255 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Melapor                                   | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            | SD00865.00.02 | Terlampir |
| 256 | Jumlah Korban Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 257 | Jumlah Korban Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Melapor ke P2TP2A | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 258 | Jumlah Desa atau Kelurahan Layak Anak  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 259 | Jumlah Kecamatan Layak Anak   | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 260 | Jumlah Data Keluarga Program Bangga Kencana   | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 261 | Jumlah Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting yang Tidak Stabil Tahun (N)         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 262 | Jumlah Industri Tahun N-1   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            | SD00845.02.00 | Terlampir |
| 263 | Jumlah Industri yang Masuk Sistem Aplikasi  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 264 | Jumlah Industri yang Melaporkan Data Industri di SIINas                                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 265 | Jumlah Industri yang Terdaftar SIINas   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 266 | Jumlah Keseluruhan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting yang Dipantau Tahun (N) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 267 | Jumlah Pasar yang Belum Berstandar  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            | SE00064.00.00 | Terlampir |
| 268 | Jumlah Pasar yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Mojokerto                                 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            | SE00064.00.00 | Terlampir |
| 269 | Jumlah Potensi UTTP yang Wajib Ditera dan Tera Ulang di Wilayah Kabupaten Mojokerto       | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                 | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 270 | Jumlah Promosi UMKM yang Dilaksanakan Tahun N  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 271 | Jumlah Promosi UMKM yang Dilaksanakan Tahun N - 1                                      | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 272 | Jumlah realisasi ekspor tahun n  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 273 | Jumlah realisasi ekspor tahun n-1  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 274 | Jumlah Sampel BDKT yang Diawasi dalam Tahun Berjalan Sesuai Ketentuan yang Berlaku     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 275 | Jumlah Total UTTP yang Ditera dan Ditera Ulang pada Tahun Berjalan                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 276 | Komoditi yang Tersedia di Pasar Tahun (N)  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 277 | PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 278 | PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 279 | Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan                                    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 280 | Komoditi yang Dipantau Tahun (N)   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 281 | Jumlah Industri Tahun N  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            | SD00845.02.00 | Terlampir |
| 282 | Jumlah Perusahaan yang Memiliki Fasilitas Pemenuhan Komitmen                           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                 | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 283 | Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Fasilitas Pemenuhan Komitmen                              | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 284 | Tingkat Ketersediaan Arsip   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 285 | Tingkat Ketersediaan Arsip Inaktif yang Dibuatkan Daftar                                   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 286 | Tingkat Ketersediaan Arsip Dinamis yang Dibuatkan Daftar                                   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 287 | Tingkat Kesesuaian Penyelamatan Arsip yang Digabung atau Dibubarkan Sesuai dengan NSPK     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 288 | Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Bencana Sesuai dengan NSPK | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 289 | Jumlah Koleksi Buku  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            | SP00115.00.00 | Terlampir |
| 290 | Indeks Kegemaran Membaca   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 291 | Jumlah Keterlibatan Masyarakat terkait Perpustakaan  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 292 | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 293 | Jumlah Anggota Perpustakaan  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 294 | Jumlah Pemustaka   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 295 | Jumlah Perpustakaan ber-SNP  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 296 | Jumlah Target Pengunjung atau Pengguna Arsip   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 297 | Jumlah Tenaga Perpustakaan   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan    | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                              | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|--|----------------------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 298 | Jumlah Total Perpustakaan  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 299 | Jumlah Pengunjung atau Pengguna Arsip  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 300 | Presentase Arsip Statis yang Dibuatkan Sarana Bantu Temu Kembali   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 301 | Persentase Arsip Statis yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 302 | Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 303 | Tingkat Kesesuaian Arsip Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Sesuai dengan NSPK | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 304 | Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip Sesuai dengan NSPK  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 305 | Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Sesuai dengan NSPK   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 306 | Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Ijin Penggunaan Arsip yang Sesuai dengan NSPK                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 307 | Data Area Pertanian Terdampak Bencana  | Dinas Pertanian                  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 308 | Data Area Pertanian Terdampak Bencana yang Telah Ditangani   | Dinas Pertanian                  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 309 | Data Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)   | Dinas Pertanian                  | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 310 | Data Indeks Harga yang Diterima Petani (It)  | Dinas Pertanian                  | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 311 | Data Izin Usaha Pertanian yang Difasilitasi  | Dinas Pertanian                  | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 312 | Data Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun Berjalan (N)                       | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 313 | Data PDRB (ADHB) Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan                  | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 314 | Data pengajuan Izin Usaha Pertanian  | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 315 | Data Prasarana Pertanian yang Aktif Digunakan                              | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 316 | Data Prasarana Pertanian yang Dibangun                                     | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 317 | Data Sarana Pertanian yang Diberikan                                       | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 318 | Data Sarana Pertanian yang Digunakan                                       | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 319 | Data Score Kelas Kelompok Tani Tahun Berjalan (N)                          | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 320 | Data Score Kelas Kelompok Tani Tahun Sebelumnya (N-1)                      | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 321 | Data Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun Sebelumnya (N-1)                   | Dinas Pertanian  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 322 | Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum) | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 323 | Jumlah Sarpras Jalan yang Terpasang  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 324 | Jumlah Rencana Sarpras Jalan yang Terpasang                                | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 325 | Realisasi Prasarana Jalan Tahun (N-1)                                      | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 326 | Realisasi Prasarana Jalan Tahun (N)  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 327 | Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 Hektar yang Tertangani  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 328 | Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 Hektar yang Akan Ditangani  | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 329 | Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 Hektar di Wilayah Kabupaten Mojokerto                             | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 330 | Jumlah Rumah Korban Bencana yang Ditangani   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 331 | Jumlah Rencana Fasilitas PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum) Perumahan di Kabupaten Mojokerto | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 332 | Jumlah Rencana Unit Rumah yang Ditangani   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 333 | Jumlah KPM yang Seharusnya Menerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial              | Dinas Sosial   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 334 | Jumlah Penduduk Miskin   | Dinas Sosial   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 335 | Jumlah PSKS Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Sosial   | Dinas Sosial   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 336 | Jumlah PSKS yang Seharusnya Menerima Manfaat Program Pemberdayaan Sosial                         | Dinas Sosial   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 337 | Jumlah KPM Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                              | Dinas Sosial   | √      |        | √            | SD00298.00.00 | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|--|--------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 338 | Jumlah Tagana, Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Manfaat Perlindungan dan Jaminan Sosial                 | Dinas Sosial       | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 339 | Jumlah Tagana, Korban Bencana Alam dan Sosial yang Seharusnya Menerima Manfaat Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial       | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 340 | Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Manfaat Kesejahteraan Sosial  | Dinas Sosial       | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 341 | Jumlah PPKS Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial  | Dinas Sosial       | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 342 | Program Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan  | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 343 | Jumlah Tenaga Kerja Terdata  | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 344 | Jumlah Seluruh Perusahaan yang Terdata BPJS  | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 345 | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Jaminan Sosial  | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 346 | Jumlah Program yang Mengacu pada Perencanaan Ketenagakerjaan   | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 347 | Jumlah Peserta yang Dilatih  | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 348 | Jumlah Peserta Pelatihan yang Terdata  | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 349 | Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi   | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 350 | Jumlah Perusahaan yang Terjadi Perselisihan Hubungan Industrial  | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 351 | Jumlah Peserta Pelatihan Keseluruhan (Disnaker)                         | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 352 | Jumlah Perusahaan yang Terdata  | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 353 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Kepesertaan Jaminan Sosial Pekerja          | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 354 | Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terjadi                    | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 355 | Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan               | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 356 | Jumlah Penduduk Tidak Bekerja (Pengangguran)                            | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            | SD01370.02.00 | Terlampir |
| 357 | Jumlah Pencari Kerja yang Terserap                                      | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 358 | Jumlah Pencari Kerja yang Terdata                                       | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 359 | Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi                          | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 360 | Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang Terdata                            | Dinas Tenaga Kerja | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 361 | Angkatan Kerja  | Dinas Tenaga Kerja | √      | √      | √            | SP00073.01.01 | Terlampir |
| 362 | Total Temuan Inspektorat Kabupaten Mojokerto                            | Inspektorat        | √      |        | √            | ST00916.00.00 | Terlampir |
| 363 | Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto                  | Inspektorat        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 364 | Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Inspektorat Kabupaten Mojokerto | Inspektorat        | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 365 | Jumlah Temuan yang Selesai Ditindaklanjuti Inspektorat Kabupaten Mojokerto       | Inspektorat             | √      |        | √            | ST00916.00.00 | Terlampir |
| 366 | Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan Kecamatan Bangsal       | Kecamatan Bangsal       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 367 | Jumlah seluruh pelayanan di Kecamatan Bangsal                                    | Kecamatan Bangsal       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 368 | Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Bangsal          | Kecamatan Bangsal       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 369 | Jumlah seluruh koordinasi dan fasilitasi yang ada Kecamatan Bangsal              | Kecamatan Bangsal       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 370 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bangsal                                | Kecamatan Bangsal       | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 371 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dawarblandong                          | Kecamatan Dawarblandong | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 372 | Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Dawarblandong | Kecamatan Dawarblandong | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 373 | Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Dawarblandong    | Kecamatan Dawarblandong | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 374 | Jumlah seluruh koordinasi dan fasilitasi yang ada Kecamatan Dawarblandong        | Kecamatan Dawarblandong | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 375 | Jumlah seluruh pelayanan di Kecamatan Dawarblandong                              | Kecamatan Dawarblandong | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD               | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|---|-------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 376 | Jumlah seluruh koordinasi dan fasilitasi yang ada Kecamatan Dlanggu bulan Januari | Kecamatan Dlanggu | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 377 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Dlanggu Triwulan I Tahun 2022               | Kecamatan Dlanggu | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 378 | Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Dlanggu        | Kecamatan Dlanggu | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 379 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dlanggu                                 | Kecamatan Dlanggu | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 380 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan Dlanggu           | Kecamatan Dlanggu | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 381 | Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitasi yang Ada Kecamatan Gedeg                 | Kecamatan Gedeg   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 382 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan Gedeg             | Kecamatan Gedeg   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 383 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Gedeg                                       | Kecamatan Gedeg   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 384 | Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Gedeg          | Kecamatan Gedeg   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 385 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gedeg                                   | Kecamatan Gedeg   | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 386 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gondang                                 | Kecamatan Gondang | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 387 | Jumlah Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Gondang        | Kecamatan Gondang | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|--|--------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 388 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Gondang                                    | Kecamatan Gondang  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 389 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas yang Ditindaklanjuti Kecamatan Gondang           | Kecamatan Gondang  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 390 | Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitas yang Ada Kecamatan Gondang               | Kecamatan Gondang  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 391 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Jatirejo                                   | Kecamatan Jatirejo | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 392 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas yang Ditindaklanjuti Kecamatan Jatirejo          | Kecamatan Jatirejo | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 393 | Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitas yang Ada Kecamatan Jatirejo              | Kecamatan Jatirejo | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 394 | Jumlah Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Jatirejo      | Kecamatan Jatirejo | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 395 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatirejo                               | Kecamatan Jatirejo | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 396 | Jumlah Seluruh Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Jetis | Kecamatan Jetis    | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 397 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas yang Ditindaklanjuti Kecamatan Jetis             | Kecamatan Jetis    | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 398 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jetis                                  | Kecamatan Jetis    | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 399 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Jetis                                      | Kecamatan Jetis    | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                 | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|--|---------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 400 | Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitas yang Ada Kecamatan Jetis                   | Kecamatan Jetis     | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 401 | Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitas yang Ada Kecamatan Kemlagi                 | Kecamatan Kemlagi   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 402 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kemlagi                                  | Kecamatan Kemlagi   | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 403 | Jumlah Seluruh Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Kemlagi | Kecamatan Kemlagi   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 404 | Jumlah Seluruh Pelayanan Kecamatan Kemlagi   | Kecamatan Kemlagi   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 405 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas yang Ditindaklanjuti Kecamatan Kemlagi             | Kecamatan Kemlagi   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 406 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Kutorejo                                     | Kecamatan Kutorejo  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 407 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas yang Ditindaklanjuti Kecamatan Kutorejo            | Kecamatan Kutorejo  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 408 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kutorejo                                 | Kecamatan Kutorejo  | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 409 | Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitas yang Ada Kecamatan Kutorejo                | Kecamatan Kutorejo  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 410 | Jumlah Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Kutorejo        | Kecamatan Kutorejo  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 411 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mojoanyar                                | Kecamatan Mojoanyar | √      | √      | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                 | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|--|---------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 412 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan Mojoanyar    | Kecamatan Mojoanyar | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 413 | Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Mojoanyar | Kecamatan Mojoanyar | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 414 | Jumlah seluruh koordinasi dan fasilitasi yang ada Kecamatan Mojoanyar        | Kecamatan Mojoanyar | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 415 | Jumlah seluruh pelayanan di Kecamatan Mojoanyar                              | Kecamatan Mojoanyar | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 416 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mojosari                           | Kecamatan Mojosari  | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 417 | Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Mojosari  | Kecamatan Mojosari  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 418 | Jumlah seluruh pelayanan di Kecamatan Mojosari                               | Kecamatan Mojosari  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 419 | Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Mojosari     | Kecamatan Mojosari  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 420 | Jumlah seluruh koordinasi dan fasilitasi yang ada Kecamatan Mojosari         | Kecamatan Mojosari  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 421 | Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Ngoro        | Kecamatan Ngoro     | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 422 | Jumlah seluruh koordinasi dan fasilitasi yang ada Kecamatan Ngoro            | Kecamatan Ngoro     | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 423 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngoro                              | Kecamatan Ngoro     | √      | √      | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|---|--------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 424 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Ngoro                                 | Kecamatan Ngoro    | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 425 | Jumlah Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Ngoro    | Kecamatan Ngoro    | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 426 | Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pacet       | Kecamatan Pacet    | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 427 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pacet                             | Kecamatan Pacet    | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 428 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Pacet                                 | Kecamatan Pacet    | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 429 | Jumlah seluruh koordinasi dan fasilitasi yang ada Kecamatan Pacet           | Kecamatan Pacet    | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 430 | Jumlah Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Pacet    | Kecamatan Pacet    | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 431 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Pungging                              | Kecamatan Pungging | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 432 | Jumlah Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Pungging | Kecamatan Pungging | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 433 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan Pungging    | Kecamatan Pungging | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 434 | Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitasi yang Ada Kecamatan Pungging        | Kecamatan Pungging | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 435 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pungging                          | Kecamatan Pungging | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD              | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|---|------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 436 | Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Puri      | Kecamatan Puri   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 437 | Jumlah seluruh koordinasi dan fasilitasi yang ada Kecamatan Puri          | Kecamatan Puri   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 438 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puri                            | Kecamatan Puri   | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 439 | Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Puri   | Kecamatan Puri   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 440 | Jumlah Seluruh Pelayanan di Kecamatan Puri                                | Kecamatan Puri   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 441 | Jumlah seluruh pelayanan di Kecamatan Sooko                               | Kecamatan Sooko  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 442 | Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan Kecamatan Sooko  | Kecamatan Sooko  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 443 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sooko                           | Kecamatan Sooko  | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 444 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan Sooko     | Kecamatan Sooko  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 445 | Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitasi yang Ada Kecamatan Sooko         | Kecamatan Sooko  | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 446 | Jumlah seluruh pelayanan di Kecamatan Trawas                              | Kecamatan Trawas | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 447 | Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan Kecamatan Trawas | Kecamatan Trawas | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                      | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|---|--------------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 448 | Jumlah Seluruh Koordinasi dan Fasilitas yang Ada Kecamatan Trawas           | Kecamatan Trawas         | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 449 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas yang Ditindaklanjuti Kecamatan Trawas       | Kecamatan Trawas         | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 450 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Trawas                            | Kecamatan Trawas         | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 451 | Jumlah koordinasi dan fasilitas yang ditindaklanjuti Kecamatan Trowulan     | Kecamatan Trowulan       | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 452 | Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Trowulan                          | Kecamatan Trowulan       | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 453 | Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Trowulan | Kecamatan Trowulan       | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 454 | Jumlah seluruh koordinasi dan fasilitas yang ada Kecamatan Trowulan         | Kecamatan Trowulan       | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 455 | Jumlah seluruh pelayanan di Kecamatan Trowulan                              | Kecamatan Trowulan       | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 456 | Akreditasi Capaian Fasilitas Kesehatan RSUD Prof. Dr. Soekandar             | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 457 | Angka Harapan Hidup (AHH) RSUD Prof. Dr. Soekandar                          | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 458 | Jumlah Indikator yang Terpenuhi RSUD Prof. Dr Soekandar                     | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 459 | Jumlah Seluruh Indikator RSUD Prof. Dr Soekandar                            | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                        | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|--|----------------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 460 | Nilai SAKIP RSUD Prof. Dr. Soekandar   | RSUD Prof. Dr. Soekandar   | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 461 | Akreditasi Capaian Fasilitas Kesehatan RSUD RA Basoeni   | RSUD RA Basoeni            | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 462 | Angka Harapan Hidup (AHH) RSUD RA Basoeni  | RSUD RA Basoeni            | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 463 | Jumlah Seluruh Indikator RSUD Basoeni  | RSUD RA Basoeni            | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 464 | Nilai SAKIP RSUD RA Basoeni  | RSUD RA Basoeni            | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 465 | Jumlah Indikator yang Terpenuhi RSUD RA Basoeni  | RSUD RA Basoeni            | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 466 | Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan                             | Satuan Polisi Pamong Praja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 467 | Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjadi                                   | Satuan Polisi Pamong Praja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 468 | Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani Satpol PP   | Satuan Polisi Pamong Praja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 469 | Jumlah Pelanggaran Perda yang Dilaporkan oleh Masyarakat atau Teridentifikasi                  | Satuan Polisi Pamong Praja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 470 | Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Mojokerto                          | Satuan Polisi Pamong Praja | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 471 | Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang Terbina atau Terlatih dan Bersertifikat | Satuan Polisi Pamong Praja | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD              | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|--|------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 472 | Jumlah Sub Kegiatan dengan Indikator Tercapai Sesuai Target Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang Terasilitasi | Sekretariat DPRD | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 473 | Jumlah Sub Kegiatan dengan Indikator Tercapai Sesuai Target Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Terasilitasi         | Sekretariat DPRD | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 474 | Jumlah Sub Kegiatan Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Terasilitasi   | Sekretariat DPRD | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 475 | Jumlah Sub Kegiatan dengan Indikator Tercapai Sesuai Target Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Terasilitasi  | Sekretariat DPRD | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 476 | Jumlah Sub Kegiatan Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Terasilitasi  | Sekretariat DPRD | √      |        | √            |           | Terlampir |
| 477 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD  | Sekretariat DPRD | √      | √      | √            |           | Terlampir |
| 478 | Jumlah Persentase Capaian Indikator Kegiatan Pemenuhan Hak DPRD  | Sekretariat DPRD | √      |        | √            |           | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD              | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN | Dokumen   |
|-----|---|------------------|--------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 479 | Jumlah Sub Kegiatan Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang Terfasilitasi | Sekretariat DPRD | √      |        | √            |           | Terlampir |

\*Lampiran pada softfile flashdisk/googledrive

Dari 479 datasets pada dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 disusun oleh 57 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk persebaran datasets RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 per masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 5.3** Jumlah datasets dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 per masing-masing OPD

| No | Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)                 | Datasets |
|----|--|----------|
| 1  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 5        |
| 2  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 8        |
| 3  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | 13       |
| 4  | Badan Pendapatan Daerah                                | 2        |
| 5  | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah                 | 6        |
| 6  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   | 9        |
| 7  | Bagian Hukum Sekretariat Daerah                        | 4        |
| 8  | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah         | 5        |
| 9  | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah                   | 3        |
| 10 | Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah                  | 1        |
| 11 | Bagian Pemerintahan Sekretariat                        | 2        |
| 12 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah    | 3        |

| No | Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)                                     | Datasets |
|----|--|----------|
| 13 | Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah                             | 3        |
| 14 | Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah                             | 3        |
| 15 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah                 | 3        |
| 16 | Bagian Umum Sekretariat Daerah   | 3        |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                    | 23       |
| 18 | Dinas Kesehatan  | 37       |
| 19 | Dinas Komunikasi dan Informatika   | 9        |
| 20 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | 9        |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup   | 23       |
| 22 | Dinas Pangan dan Perikanan   | 10       |
| 23 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                    | 22       |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                     | 12       |
| 25 | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata                            | 13       |
| 26 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                     | 6        |
| 27 | Dinas Pendidikan   | 7        |
| 28 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 16       |
| 29 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | 23       |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   | 23       |
| 31 | Dinas Pertanian  | 15       |
| 32 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan                 | 11       |
| 33 | Dinas Sosial   | 9        |
| 34 | Dinas Tenaga Kerja   | 20       |
| 35 | Inspektorat  | 4        |
| 36 | Kecamatan Bangsal  | 5        |

| No            | Nama Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) | Datasets   |
|---------------|---|------------|
| 37            | Kecamatan Dawarblandong                 | 5          |
| 38            | Kecamatan Dlanggu                       | 5          |
| 39            | Kecamatan Gedeg                         | 5          |
| 40            | Kecamatan Gondang                       | 5          |
| 41            | Kecamatan Jatirejo                      | 5          |
| 42            | Kecamatan Jetis                         | 5          |
| 43            | Kecamatan Kemlagi                       | 5          |
| 44            | Kecamatan Kutorejo                      | 5          |
| 45            | Kecamatan Mojoanyar                     | 5          |
| 46            | Kecamatan Mojosari                      | 5          |
| 47            | Kecamatan Ngoro                         | 5          |
| 48            | Kecamatan Pacet                         | 5          |
| 49            | Kecamatan Pungging                      | 5          |
| 50            | Kecamatan Puri                          | 5          |
| 51            | Kecamatan Sooko                         | 5          |
| 52            | Kecamatan Trawas                        | 5          |
| 53            | Kecamatan Trowulan                      | 5          |
| 54            | RSUD Prof. Dr. Soekandar                | 5          |
| 55            | RSUD RA Basoeni                         | 5          |
| 56            | Satuan Polisi Pamong Praja              | 6          |
| 57            | Sekretariat DPRD                        | 8          |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>479</b> |

## 5.2 Dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto

Pembangunan berkelanjutan yang mengandung makna pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, namun tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, telah berkembang melalui berbagai interpretasi skema tujuan yang ingin dicapai. Setelah *Millenium Development Goals* (MDGs) menjadi tujuan pembangunan yang dikembangkan sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2015, sekarang ini adalah era *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki tujuan lebih komprehensif dan beragam.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDG's merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi

yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sesuai dengan dokumen RAD SDGs, organisasi perangkat daerah memiliki data-data pendukung dokumen RAD SDGs yang kemudian dibuat Metadata Indikator, Metadata Variabel, dan Standar Data, dengan rekapitulasi sebagai berikut.

**Tabel 5.4** Rekapitulasi Pengerjaan Dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto

|              | <b>Total Data</b> |
|--------------|-------------------|
| Datasets     | 235               |
| MS Variabel  | 235               |
| MS Indikator | 19                |
| Standar Data | 235               |
| Kode SDSN    | 70                |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa total datasets dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto sebanyak 235 datasets, dengan jumlah metadata variabel yang tersusun sebanyak 235 datasets, metadata indikator yang tersusun sebanyak 19 datasets, dan standar data yang tersusun sebanyak 235 datasets. Dari 235 standar data sebanyak 70 datasets telah memiliki kode SDSN.

Berikut merupakan rincian dari rekapitulasi penyusunan metadata statistik variabel, metadata statistik indikator, dan standar data terhadap dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 5.5** Rekapitulasi Penyusunan Metadata Statistik Variabel, Metadata Statistik Indikator, dan Standar Data Terhadap Dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto

| No. | Nama Data  | OPD             | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 1   | Jumlah Data Penduduk Umur $\geq$ 18 tahun yang IMT $\geq$ 30   | Dinas Kesehatan | √      | √      | √            | SD00796.00.01 | Terlampir |
| 2   | Jumlah Estimasi Penderita Tuberkulosis   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00796.00.01 | Terlampir |
| 3   | Jumlah Ibu Bersalin Usia 15-49 Tahun yang Mendapat Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Faskes Kabupaten Mojokerto     | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 4   | Jumlah Ibu Bersalin Usia 15-49 Tahun yang Ditolong Tenaga Kesehatan  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 5   | Jumlah Tuberkulosis dalam Kurun Waktu 1 Tahun  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00796.00.02 | Terlampir |
| 6   | Jumlah Balita Usia Sampai 59 Bulan yang Meninggal  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 7   | Jumlah Seluruh Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Lain | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD01174.01.01 | Terlampir |
| 8   | Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Berusia 15 Tahun Berdasarkan Angka Prevalensi                                       | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD01165.00.00 | Terlampir |
| 9   | Jumlah Bayi yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00614.01.00 | Terlampir |
| 10  | Jumlah Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 11  | Jumlah Seluruh Kasus HIV   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 12  | Jumlah Puskesmas yang Memiliki Obat dan Vaksin Esensial  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD             | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 13  | Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Lain | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 14  | Jumlah Seluruh Batita (Anak Umur 12-23 Bulan)   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 15  | Jumlah Bayi Lahir Hidup   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 16  | Jumlah Perawat yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Lain                     | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 17  | Jumlah Kematian Ibu   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00889.00.00 | Terlampir |
| 18  | Jumlah Seluruh Ibu Hamil  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 19  | Jumlah Seluruh Ibu Bersalin Usia 15-49 Tahun  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD01804.00.00 | Terlampir |
| 20  | Jumlah Surviving Infant (Perkiraan Bayi Hidup)  | Dinas Kesehatan | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 21  | Jumlah Balita Usia 28 Hari yang Meninggal   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 22  | Jumlah Kasus Malaria Positif (dengan Pemeriksaan Sediaan Darah)   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00081.00.00 | Terlampir |
| 23  | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan                                   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00690.00.00 | Terlampir |
| 24  | Jumlah Rumah Tangga di Wilayah Kerja Puskesmas  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD             | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 25  | Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00499.00.00 | Terlampir |
| 26  | Jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00500.00.00 | Terlampir |
| 27  | Jumlah Tenaga Kefarmasian yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Lain                    | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 28  | Jumlah Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Lain | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 29  | Jumlah Bidan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Lain                                 | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 30  | Jumlah Balita yang Diukur   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 31  | Jumlah Anak Usia Kurang dari 5 Tahun yang Malnutrisi  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 32  | Jumlah Anak di Bawah 2 Tahun Diukur   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 33  | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Mencuci Tangan dengan Sabun dan Air   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00687.00.00 | Terlampir |
| 34  | Jumlah Penduduk yang Menjadi Peserta JKN  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 35  | Jumlah Balita dengan Stunting   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD             | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 36  | Jumlah Penderita Penyakit Jantung, Kanker, Diabetes atau Penyakit Pernapasan Kronis yang Ditemukan | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 37  | Jumlah Penderita Penyakit Pernapasan Kronis yang Ditemukan   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 38  | Jumlah Balita Umur 0-59 Bulan dengan Status Gizi Kurang  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 39  | Jumlah Balita Umur 0-59 Bulan yang Ditimbang   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 40  | Jumlah Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Dilakukan Recall   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 41  | Jumlah Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif                                | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 42  | Jumlah Estimasi Penderita Hepatitis B  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00585.00.02 | Terlampir |
| 43  | Jumlah Penderita Hepatitis B dalam Kurun Waktu 1 Tahun   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 44  | Jumlah Kasus Tuberkulosis  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00796.00.02 | Terlampir |
| 45  | Jumlah Penderita Penyakit Jantung yang Ditemukan   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 46  | Jumlah Penderita Penyakit Kanker yang Ditemukan  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 47  | Jumlah Penderita Hipertensi Usia ≥ 15 Tahun yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 48  | Jumlah Kematian Akibat Penyakit Jantung, Kanker, Diabetes, atau Penyakit Pernapasan Kronis         | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00887.00.00 | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD             | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 49  | Jumlah Kematian Akibat Penyakit Kanker   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 50  | Jumlah Kematian Akibat Penyakit Pernapasan Kronis                                | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 51  | Jumlah Kematian Akibat Penyakit Diabetes   | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 52  | Jumlah Kematian Akibat Penyakit Jantung  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 53  | Jumlah Akumulasi Kasus Filariasis dan Kusta                                      | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 54  | Jumlah Seluruh Kasus Kronis Filariasis dan Kusta yang Pindah dan Meninggal       | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 55  | Jumlah Anak di Bawah 2 Tahun dengan Stunting                                     | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 56  | Jumlah Balita 0-59 Bulan yang Ditimbang dan Diukur                               | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 57  | Jumlah Penderita Penyakit Diabetes yang Ditemukan                                | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 58  | Jumlah Ibu Hamil Periksa Hb  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 59  | Jumlah Ibu Hamil Anemia  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            | SD00606.00.00 | Terlampir |
| 60  | Jumlah Penduduk yang Dicakup Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 61  | Jumlah Kasus Infeksi Baru HIV  | Dinas Kesehatan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 62  | Jumlah Dokter Umum dan Spesialis yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Lain  | Dinas Kesehatan  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 63  | Jumlah Akseptor KB   | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            | SD01606.00.00 | Terlampir |
| 64  | Jumlah Akseptor KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 65  | Jumlah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang Menjamin Perempuan Umur 15-49 Tahun untuk Mendapatkan Pelayanan, Informasi dan Pendidikan Terkait Kesehatan Seksual dan Reproduksi | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 66  | Jumlah Kasus Ingin Anak Ditunda dan Tidak Ingin Anak Lagi  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 67  | Jumlah Usia Kawin Pertama Penduduk Wanita  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 68  | Jumlah Usia Kawin Pertama Penduduk Wanita Kurang dari 20 Tahun   | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 69  | Jumlah Perempuan dan Laki-laki Muda Umur 18-24 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun                        | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 70  | Jumlah Perempuan dan Laki-laki Muda Umur 18-29 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun                        | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            | SD00862.00.00 | Terlampir |
| 71  | Jumlah Kasus Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 72  | Jumlah Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan atau Pelecehan Seksual  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 73  | Jumlah Laki-laki yang Menjadi Korban Kekerasan atau Pelecehan Seksual  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 74  | Jumlah Orang yang Menjadi Korban Kekerasan atau Pelecehan Seksual  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 75  | Jumlah Sosialisasi Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Metode Kontrasepsi Modern                           | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 76  | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif   | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 77  | Jumlah Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            | SD00865.00.02 | Terlampir |
| 78  | Jumlah Kekerasan terhadap Anak Perempuan  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 79  | Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan   | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 80  | Jumlah Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Pasangan atau Mantan Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir           | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | √      |        | √            | SD00865.00.02 | Terlampir |
| 81  | Jumlah Lembaga SD/MI  | Dinas Pendidikan   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 82  | Jumlah Siswa pada SD/MI/Sederajat   | Dinas Pendidikan   | √      |        | √            | SP00274.00.00 | Terlampir |
| 83  | Jumlah Siswa pada SMP/MTs/Sederajat   | Dinas Pendidikan   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 84  | Jumlah Lembaga SD/MI yang Berakreditasi Minimal B   | Dinas Pendidikan   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 85  | Jumlah Lembaga SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B   | Dinas Pendidikan   | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                    | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 86  | Jumlah Lembaga SMP/MTs   | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 87  | Jumlah Siswa pada PAUD   | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 88  | Jumlah Siswa (SD,MI) Perempuan Usia 7-12 Tahun   | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 89  | Jumlah Siswa (SD,MI) Laki-laki Usia 7-12 Tahun   | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 90  | Jumlah Siswa (SMP,MTs) Perempuan Usia 13-15 Tahun  | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 91  | Jumlah Siswa (SMP,MTs) Laki-laki Usia 13-15 Tahun  | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 92  | Jumlah Siswa pada TK/PAUD Usia 4-6 Tahun   | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 93  | Jumlah Guru TK, SD, SMP  | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 94  | Jumlah Guru TK, SD, SMP, yang Bersertifikat Pendidik   | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 95  | Jumlah Peserta Didik Laki-laki/Perempuan   | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 96  | Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan   | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 97  | Jumlah Muda (15-18 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) | Dinas Pendidikan       | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 98  | Rasio Emisi CO2 atau Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri                | Dinas Lingkungan Hidup | √      | √      | √            | SD01829.00.00 | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                    | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
|     |  |                        |        |        | √            | SD01196.00.00 | Terlampir |
| 99  | Proporsi Badan Air dengan Kualitas Air yang Baik   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            | SD01690.00.00 | Terlampir |
| 100 | Proporsi Badan Udara dengan Kualitas Udara Ambien yang Baik                              | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 101 | Jumlah Sampah yang Dikumpulkan secara Teratur dengan Pemrosesan Akhir yang Baik          | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 102 | Jumlah Sampah yang Didaur Ulang  | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 103 | Jumlah Keseluruhan Sampah  | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 104 | Jumlah Titik di Kabupaten Mojokerto  | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            | SD01063.00.00 | Terlampir |
| 105 | Jumlah Kecamatan   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 106 | Jumlah Desa/Kelurahan Hijau yang Mengembangkan dan Menerapkan Green Waste (Desa Lestari) | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            | SP00233.01.00 | Terlampir |
| 107 | Persentase Perubahan Emisi CO2 & Emisi Gas Rumah Kaca                                    | Dinas Lingkungan Hidup | √      | √      | √            | SD01538.00.00 | Terlampir |
|     |  |                        |        |        | √            | SD01196.00.00 | Terlampir |
| 108 | Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati                                 | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            | SD01342.00.00 | Terlampir |
| 109 | Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang Ditangani   | Dinas Lingkungan Hidup | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 110 | Jumlah IPAL yang Terbangun   | Dinas Lingkungan Hidup               | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 111 | Bauran Energi Terbarukan   | Dinas Lingkungan Hidup               | √      | √      | √            | SD00401.00.00 | Terlampir |
|     |  |                                      |        |        |              | SD00546.00.01 | Terlampir |
|     |  |                                      |        |        |              | SD00544.00.00 | Terlampir |
| 112 | Jumlah Energi Terbarukan   | Dinas Lingkungan Hidup               | √      |        | √            | SD00546.00.01 | Terlampir |
| 113 | Jumlah Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)  | Dinas Lingkungan Hidup               | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 114 | Laju Pertumbuhan Penduduk  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 115 | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang Diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 116 | Indeks Kebebasan Sipil   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | √      |        | √            | SD01339.00.00 | Terlampir |
| 117 | Jumlah Indikator SDGs Terpilah yang Relevan dengan Target Kabupaten Mojokerto  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 118 | Jumlah Seluruh Indikator SDGs Kabupaten Mojokerto  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 119 | Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi Seluruh Daratan Kabupaten Mojokerto  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 120 | Luas Lahan Terdegradasi Seluruh Daratan  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 121 | Luas Lahan Tutupan Hutan Seluruh Daratan                                       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    | √      |        | √            | SD00494.00.00 | Terlampir |
| 122 | Luas Lahan Seluruh Daratan   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 123 | Luas Lahan Berhutan Seluruh Daratan  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 124 | Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan                               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 125 | Laju Peningkatan Konsumsi Tanah  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    | √      |        | √            | ST00781.00.00 | Terlampir |
| 126 | Indeks Hak-Hak Politik Kabupaten Mojokerto                                     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    | √      | √      | √            | SD01830.00.00 | Terlampir |
| 127 | Penduduk Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin                       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            | SD01181.00.00 | Terlampir |
| 128 | Penduduk Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 129 | Jumlah Penduduk Umur di Bawah 5 Tahun  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 130 | Jumlah Penduduk Umur di Bawah 5 Tahun yang Memiliki Akta kelahiran             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            | SP00085.00.01 | Terlampir |
| 131 | Jumlah Penduduk 0-17 Tahun   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 132 | Jumlah Penduduk 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran                   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 133 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 7-12 Tahun  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 134 | Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 13-15 Tahun   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 135 | Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 136 | Jumlah Penduduk Perempuan Usia 7-12 Tahun  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 137 | Jumlah Penduduk Perempuan Usia 13-15 Tahun   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 138 | Penduduk Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Sebelum Umur 15 Tahun   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 139 | Tersedianya Data Registrasi Terkait Kelahiran dan Kematian (Vital Statistics Register)   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 140 | Jumlah Penyakit Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto                                  | RSUD Prof. Dr. Soekandar                | √      |        | √            | SD01165.00.00 | Terlampir |
| 141 | Jumlah Kematian Akibat Kanker di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto  | RSUD Prof. Dr. Soekandar                | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 142 | Jumlah Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan Darurat Kesehatan di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto | RSUD Prof. Dr. Soekandar                | √      |        | √            | SD01385.00.00 | Terlampir |
| 143 | Estimasi Kejadian Tidak Terduga Akibat Keracunan di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto                                   | RSUD Prof. Dr. Soekandar                | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                      | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|--------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 144 | Jumlah Perempuan yang Proses Melahirkan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto     | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 145 | Jumlah Perempuan yang Proses Melahirkan di Fasilitas Kesehatan RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto                         | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 146 | Jumlah Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      | √      | √            | SD00641.00.00 | Terlampir |
| 147 | Jumlah Kematian Akibat Cedera Fatal Kecelakaan Lalu Lintas di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto                          | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 148 | Jumlah Kematian Akibat Pernapasan Kronis di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto  | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 149 | Jumlah Kematian Akibat Jantung di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto  | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 150 | Jumlah Kematian Akibat Diabetes di RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto   | RSUD Prof. Dr. Soekandar | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 151 | Estimasi Kejadian Tidak Terduga Akibat Keracunan di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto  | RSUD RA. Basoeni         | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 152 | Jumlah Kematian Akibat Diabetes di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto   | RSUD RA. Basoeni         | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 153 | Jumlah Kematian Akibat Jantung di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto  | RSUD RA. Basoeni         | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 154 | Jumlah Penyakit Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto  | RSUD RA. Basoeni                        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 155 | Jumlah Kematian Akibat Cedera Fatal Kecelakaan Lalu Lintas di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto   | RSUD RA. Basoeni                        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 156 | Jumlah Kematian Akibat Pernapasan Kronis di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto   | RSUD RA. Basoeni                        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 157 | Jumlah Kematian Akibat Kanker di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto  | RSUD RA. Basoeni                        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 158 | Jumlah Perempuan yang Proses Melahirkan di Fasilitas Kesehatan RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto  | RSUD RA. Basoeni                        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 159 | Jumlah Perempuan yang Proses Melahirkan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto  | RSUD RA. Basoeni                        | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 160 | Jumlah Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto                                    | RSUD RA. Basoeni                        | √      | √      | √            | SD00641.00.00 | Terlampir |
| 161 | Jumlah Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan Darurat Kesehatan di RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto                                     | RSUD RA. Basoeni                        | √      |        | √            | SD01385.00.00 | Terlampir |
| 162 | Jumlah Target Unit Pemerintah Lokal yang Menerbitkan dan Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air dan Sanitasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 163 | Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD                                     | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 164 | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan Terlindungi dalam Kabupaten/Kota                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 165 | Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 166 | Jumlah Realisasi Unit Pemerintah Lokal yang Menerbitkan dan Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air dan Sanitasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 167 | Jumlah Penduduk yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 168 | Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 169 | Jumlah Penduduk   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 170 | Jumlah ODA terkait Air dan Sanitasi yang Menjadi Bagian Rencana Belanja Pemerintah  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            | SD00747.00.00 | Terlampir |
| 171 | Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 172 | Jumlah Realisasi Korban Bencana Sosial yang Dipenuhi Kebutuhannya   | Dinas Sosial                            | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 173 | Jumlah Populasi Penyandang Disabilitas  | Dinas Sosial                            | √      |        | √            | SP00066.00.00 | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 174 | Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial  | Dinas Sosial   | √      |        | √            | SD01667.00.00 | Terlampir |
| 175 | Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Fungsinya  | Dinas Sosial   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 176 | Jumlah Lansia yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial  | Dinas Sosial   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 177 | Jumlah Realisasi Kelompok Miskin yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial   | Dinas Sosial   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 178 | Jumlah Target Kelompok Miskin yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial  | Dinas Sosial   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 179 | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan                                   | Dinas Sosial   | √      |        | √            | SD01055.00.00 | Terlampir |
| 180 | Jumlah Target Korban Bencana Sosial yang Dipenuhi Kebutuhannya   | Dinas Sosial   | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 181 | Jumlah Keterwakilan Keseluruhan (Perempuan dan Laki-Laki) sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II) | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 182 | Jumlah PNS yang Berjenis Kelamin Perempuan   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 183 | Jumlah PNS Keseluruhan (Laki-Laki dan Perempuan)   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 184 | Jumlah PNS pada Posisi Eselon II,III,IV  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 185 | Jumlah PNS yang Berjenis Kelamin Perempuan di Posisi Eselon II,III,IV  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √      |        | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 186 | Jumlah Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II)   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 187 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara   | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  | √      |        | √            | SD00142.00.00 | Terlampir |
| 188 | Jumlah Pekerja pada Industri Pariwisata dalam Proporsi terhadap Total Pekerja  | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  | √      | √      | √            | SD00201.00.00 | Terlampir |
| 189 | Jumlah Belanja (Publik dan Swasta) per Kapita yang Diperuntukkan untuk Preservasi, Perlindungan, Konservasi pada Semua Warisan Budaya dan Alam Menurut Jenis Warisan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  | √      |        | √            | SD01234.00.00 | Terlampir |
| 190 | Jumlah Desa atau Kelurahan yang Memiliki Situs Bersejarah  | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 191 | Jumlah Dokumen Strategi atau Kebijakan Pariwisata dan Kebudayaan Berkelanjutan dan Pelaksanaan Rencana Aksi dengan Perangkat Monitoring dan Evaluasi yang Disepakati | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 192 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Mojokerto  | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  | √      |        | √            | SD01314.01.00 | Terlampir |
| 193 | Jumlah Seluruh Pekerja pada Periode Waktu yang Sama  | Dinas Tenaga Kerja                                     | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 194 | Jumlah Pekerja yang Memiliki Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Periode Waktu Tertentu   | Dinas Tenaga Kerja                                     | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 195 | Jumlah Tenaga Kerja  | Dinas Tenaga Kerja                                     | √      |        | √            | SE00244.01.03 | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                 | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|-------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 196 | Jumlah Tenaga Kerja Formal   | Dinas Tenaga Kerja                  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 197 | Jumlah Perusahaan Berskala Besar   | Dinas Tenaga Kerja                  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 198 | Jumlah Penduduk yang Tidak Bekerja   | Dinas Tenaga Kerja                  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 199 | Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 200 | Jumlah Kerugian/Kerusakan Akibat Bencana   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 201 | Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim serta Kebencanaan  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            | SD01109.00.00 | Terlampir |
| 202 | Jumlah Dokumen Strategi PRB Tingkat Kabupaten  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            | SD00524.00.02 | Terlampir |
| 203 | Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan/Pelatihan Kebencanaan   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 204 | Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | √      |        | √            | SD00752.00.00 | Terlampir |
| 205 | Jumlah Ketersediaan Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) yang Independen dan Sejalan dengan Paris Principles  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | √      |        | √            | SD00040.00.00 | Terlampir |
| 206 | Jumlah Kasus Terverifikasi Atas Pembunuhan, Penculikan dan Penghilangan secara Paksa, Penahanan Sewenang-Wenang dan Penyiksaan terhadap Jurnalis, Awak Media, Serikat Pekerja, dan Pembela HAM dalam 12 Bulan Terakhir | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | √      |        | √            | SD00718.00.00 | Terlampir |
| 207 | Indeks Lembaga Demokrasi   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | √      | √      | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD                                  | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|--------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 208 | Jumlah Produk Ramah Lingkungan yang Teregister   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 209 | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      |        | √            | SD01605.00.00 | Terlampir |
| 210 | Nilai Tambah Industri Kecil  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      | √      | √            | SD00145.00.00 | Terlampir |
| 211 | Total Nilai Tambah Industri  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | √      | √      | √            |               | Terlampir |
| 212 | Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Berjenis Kelamin Laki-laki   | Sekretariat DPRD                     | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 213 | Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Berjenis Kelamin Perempuan   | Sekretariat DPRD                     | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 214 | Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto  | Sekretariat DPRD                     | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 215 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   | Badan Pendapatan Daerah              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 216 | Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto   | Badan Pendapatan Daerah              | √      |        | √            | SE00060.00.00 | Terlampir |
| 217 | Jumlah Kasus Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi                            | Bagian Hukum Sekretariat Daerah      | √      |        | √            | SD00166.00.00 | Terlampir |
| 218 | Jumlah Bantuan Hukum Atas Gugatan/Permasalahan Hukum OPD dan Desa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi dan Non Litigasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 219 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Mojokerto   | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | √      | √      | √            |               | Terlampir |

| No. | Nama Data  | OPD   | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|--|---|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 220 | Indeks Reformasi Birokrasi   | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah                | √      | √      | √            | SD00759.00.00 | Terlampir |
| 221 | Jumlah Tender yang Diselesaikan  | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 222 | Jumlah Seluruh Tender  | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 223 | Tersedianya Program dan Kegiatan yang Menjalankan Kewajiban sebagaimana Diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | Dinas Komunikasi dan Informatika                    | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 224 | Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Mengukur Kualitas PPID dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi sebagaimana Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Komunikasi dan Informatika                    | √      |        | √            | SD00721.00.00 | Terlampir |
| 225 | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Akses Pembiayaan   | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 226 | Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Akses Pembiayaan  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                      | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 227 | Jumlah Desa Mandiri  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa              | √      |        | √            | SD00497.00.00 | Terlampir |
| 228 | Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Mojokerto  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa              | √      |        | √            | SD00498.00.00 | Terlampir |
| 229 | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah              | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 230 | Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/  | Inspektorat   | √      |        | √            | SD00164.00.00 | Terlampir |

| No. | Nama Data   | OPD             | MS-Var | MS-Ind | Standar Data | Kode SDSN     | Dokumen   |
|-----|---|-----------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|
|     | Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) |                 |        |        |              |               |           |
| 231 | Jumlah Bibit Kopi yang Diperbantukan                    | Dinas Pertanian | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 232 | Jumlah Hewan Ternak yang Diperbantukan                  | Dinas Pertanian | √      |        | √            | ST00794.01.00 | Terlampir |
| 233 | Jumlah Kelompok Tani                                    | Dinas Pertanian | √      |        | √            |               | Terlampir |
| 234 | Jumlah Luasan yang Masuk KP2B dari 18 Kecamatan         | Dinas Pertanian | √      |        | √            | SD00818.00.00 | Terlampir |
| 235 | Luas Panen Padi Sawah dan Padi Ladang                   | Dinas Pertanian | √      |        | √            |               | Terlampir |

\*Lampiran pada softfile flashdisk/googledrive

Dari 235 datasets pada dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto disusun oleh 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk persebaran datasets RAD SDGs Kabupaten Mojokerto per masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 5.6** jumlah datasets dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto per masing-masing OPD

| No | Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)                 | Datasets |
|----|--|----------|
| 1  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6        |
| 2  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 4        |
| 3  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    | 5        |
| 4  | Badan Pendapatan Daerah                                | 2        |

| No            | Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)                                     | Datasets   |
|---------------|--|------------|
| 5             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                       | 13         |
| 6             | Bagian Hukum Sekretariat Daerah  | 2          |
| 7             | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah                                       | 2          |
| 8             | Bagian Pemerintahan Sekretariat  | 1          |
| 9             | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah                        | 2          |
| 10            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                    | 13         |
| 11            | Dinas Kesehatan  | 62         |
| 12            | Dinas Komunikasi dan Informatika   | 2          |
| 13            | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro   | 2          |
| 14            | Dinas Lingkungan Hidup   | 16         |
| 15            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                    | 10         |
| 16            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                     | 2          |
| 17            | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                      | 6          |
| 18            | Dinas Pendidikan   | 17         |
| 19            | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 18         |
| 20            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  | 4          |
| 21            | Dinas Pertanian  | 5          |
| 22            | Dinas Sosial   | 9          |
| 23            | Dinas Tenaga Kerja   | 6          |
| 24            | Inspektorat  | 1          |
| 25            | RSUD Prof. Dr. Soekandar   | 11         |
| 26            | RSUD RA Basoeni  | 11         |
| 27            | Sekretariat DPRD   | 3          |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>235</b> |



# **BAB V**

# **PENUTUP**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Hasil Penyusunan Metadata dan Standar Data Kabupaten Mojokerto telah tersusun metadata variabel, metadata indikator dan standar data pada dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto. Dari dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 telah tersusun metadata variabel sebanyak 479 dataset, metadata indikator yang tersusun sebanyak 44 datasets, dan standar data yang tersusun sebanyak 479 datasets. Sedangkan dari dokumen RAD SDGs Kabupaten Mojokerto telah disusun metadata variabel sebanyak 235 datasets, metadata indikator yang tersusun sebanyak 19 datasets, dan standar data yang tersusun sebanyak 235 datasets.

#### **6.2 Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat diberikan dari kegiatan Penyusunan Metadata dan Standar Data Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut.

1. Sebagai perwujudan pemenuhan Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto, saat ini telah disusun metadata dan standar data pada kelompok dokumen RPJMD dan RAD SDGs. Harapannya kedepannya dapat melengkapi metadata dan standar data bertahap dari setiap kelompok data.

2. Seiring dengan perkembangan data, pastinya akan ada data baru pada Satu Data Palapa, sebelum menambahkan data baru sebaiknya terlebih dahulu menentukan/menyusun standar data dan metadata, sehingga sebelum data dipublikasi telah memiliki identitas data.
3. Dalam optimalisasi Satu Data Palapa dan meningkatkan komitmen OPD pada percepatan Satu Data Palapa, dapat dipertimbangkan kedepannya untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menginput data pada portal Satu Data Palapa, sehingga terdapat serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan portal Satu Data Palapa.
4. Selain metadata dan standar data, salah satu prinsip satu data lainnya adalah menggunakan kode referensi/induk data, sehingga kedepannya perlu Menyusun kode referensi untuk melengkapi Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto.
5. Dalam menciptakan Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik lagi, sebaiknya dilakukan penyusunan Rencana Aksi Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto yang mengacu dan selaras dengan Rencana Aksi Satu Data Indonesia dan Rencana Aksi Satu Data Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2022). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2022*. Kabupaten Mojokerto : BPS Kabupaten Mojokerto.
- Caplan, P. (2003). *Metadata Fundamentals for All Librarians*. Chicago: ALA Editions.
- National Information Standards Organization. (2004). *Understanding Metadata*. USA: NISO Press.



**Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Mojokerto**